

RKKT

(Rencana Kinerja Tahunan)

2019



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

Perjanjian Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Tahun 2019



KATA PENGANTAR

Kehadiran Kota Makassar sebagai kota metropolitan yang sedang mengalami perkembangan pesat, sangat membutuhkan dukungan kebijakan termasuk dalam hal pembangunan dan pengelolaan prasarana ke-PU-an serta sarana penunjang lainnya, yang secara kelembagaan merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengembangan prasarana wilayah.

Penyusunan “Perjanjian Kinerja” merupakan upaya pemaparan data Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, baik data yang menyangkut kepegawaian, sarana dan prasarana maupun data capaian hasil kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tahun 2018. Buku ini juga merupakan bahan evaluasi, komparasi, serta penilaian untuk penyusunan kebijakan dalam bidang ke-PU-an di Kota Makassar, serta sebagai sumber data bagi masyarakat Kota Makassar pada umumnya.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Makassar, 2019
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Makassar
ttd
Ir. M. ANSAR, M.Si

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Aspek Strategik Organisasi	3
C. Struktur Organisasi	3
D. Lingkungan Internal	22
E. Analisa Lingkungan Strategik (SWOT)	22
E.1. Analisis Lingkungan Internal	23
E.2. Analisis Lingkungan Eksternal	24
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II RENCANA STRATEGIK	27
A. Visi	27
B. Misi	28
C. Tujuan	29
D. Perencanaan Kinerja Tahun 2019	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	97
A. Indikator Kinerja	34
B. Metodologi Pengukuran Kinerja	107
C. Hasil Pengukuran Kinerja	107
D. Akuntabilitas Keuangan	108
BAB IV PENUTUP	109

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II hingga ke pimpinan tertinggi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan stratejik yang dirumuskan sebelumnya.

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kota Makassar adalah Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan yang merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan serta pembangunan Nasional, sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi motor penggerak dalam pembangunan di Daerah yang dapat mensinergikan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar sehingga setiap misi yang diemban oleh Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan visi Kota dapat tercapai setiap tahun yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) pada masing-masing SKPD. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah dilaksanakan

wajib disusun ke dalam suatu ikatan kontrak kerja dalam bentuk penetapan kinerja sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2009 Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar serta PERWALI Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Kedudukan Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai lembaga teknis daerah merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu didukung dengan ketersediaan anggaran dan berbagai fasilitas yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sehingga kinerja Dinas Pekerjaan Umum dapat tercapai. Sebagai wujud dari kontrak kerja Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah Kota Makassar dituangkan dalam Penetapan Target Kinerja yang dikenal sebagai TAPKIN yang telah diubah menjadi Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B. Aspek Strategik Organisasi.

Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai SKPD teknis yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur, sejauh ini telah berusaha ikut berperan dalam upaya antisipasi berbagai permasalahan kota utamanya melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan. Serta senantiasa melakukan koordinasi dan mengakomodir aspirasi masyarakat secara rutin dan teratur pada tingkat Kota Makassar yang akan dituangkan dalam suatu program dan kegiatan guna terlaksananya visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan pencapaian pelaksanaan program pembangunan di Kota Makassar.

Program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar disusun dengan skala prioritas dengan memperhatikan Visi dan Misi dan perubahan kondisi strategis Pemerintah Kota Makassar yang berfokus pada kebijakan pembangunan infrastruktur dan mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkearifan lokal sebagaimana visi kepala daerah yaitu : Terwujudnya Kota Dunia Baru yang Aman dan Nyaman untuk semua.

C. Struktur Organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kota Makassar. Penjabaran PERDA tersebut yaitu PERWALI Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar.

Sebagaimana yang tercantum dalam PERDA tersebut disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar mempunyai tugas pokok Merumuskan, membina, dan mengendalikan kebijakan di bidang pekerjaan umum, sarana dan prasarana lingkungan, Jalan dan jembatan termasuk trotoar, drainase, kanal, sungai dan pengelolaan ketenagalistrikan.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pekerjaan umum, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan;
- b. Penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk trotoar, drainase dan pengelolaan ketenagalistrikan;
- c. Penyusunan rencana program di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan;
- d. penyusunan rencana di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase termasuk trotoar dan pengelolaan ketenagalistrikan;
- e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknik operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya,
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. Pembinaan unit pelaksana teknis.

Adapun susunan organisasi dan uraian tugas masing-masing aparat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar diuraikan sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Bidang Bina Teknis, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan design
 2. Seksi Pengawasan dan Manajemen Konstruksi
 3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
 - d. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri atas :
 1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 3. Seksi Jalan Lingkungan
 - e. Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah, terdiri atas :
 1. Seksi Sanitasi dan Air Bersih
 2. Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah
 3. Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah
 - f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri dari :
 1. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air dan drainase
 2. Seksi Pengendalian Sumber Daya Air dan drainase
 3. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan drainase
 - g. UPTD, terdiri atas :
 1. UPTD Perbengkalan
 2. UPTD PAL
 3. UPTD Lampu Jalan.

Adapun fungsi masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas** mempunyai tugas pokok sesuai kebijaksanaan Walikota dan perundang-undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas Dinas. Dalam melaksanakan tugas, kepala dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang Pekerjaan Umum.
 - b. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum.
 - c. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
 - d. Pembinaan , pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. pengorganisasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penataan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan kegiatan urusan Umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian ;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Subbagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan ;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan,
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

BIDANG PRASARANA DAN BANGUNAN PEMERINTAH

- (1) Bidang Prasarana dan Bangunan pemerintah mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan prasarana dan bangunan pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Bangunan pemerintah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana dan bangunan pemerintah;
 - c. Pengoordinasian kegiatan di bidang prasarana dan bangunan pemerintah;
 - d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang prasarana dan bangunan pemerintah ;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah

- (1) Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyiapan administrasi pembangunan gedung/bangunan pemerintah kota
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan di bidang pembangunan gedung pemerintah;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan Gedung Pemerintah;

- c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan gedung pemerintah;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Sanitasi Dan Air Bersih

- (1) Seksi Sanitasi dan Air Bersih mempunyai tugas menyiapkan bahan pendataan, pengkajian, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana air bersih pada perumahan dan permukiman rawan air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sanitasi dan Air Bersih menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di bidang sanitasi dan air bersih;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang sanitasi dan air bersih;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang sanitasi dan air bersih;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah

- (1) Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyiapan administrasi pemeliharaan bangunan/gedung pemerintah kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di Bidang pemeliharaan gedung Pemerintah;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan Gedung Pemerintah;

- c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan gedung pemerintah;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Bidang Jalan Dan Jembatan

- (1) Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan pembangunan ,pemeliharaan jalan dan jembatan serta jalan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan Operasional di Bidang Jalan dan Jembatan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang Jalan dan Jembatan;
 - c. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang jalan dan jembatan;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang jalan dan jembatan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyiapan administrasi teknik peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan penunjangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Bidang pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyiapan administrasi teknik pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di Bidang pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Jalan Lingkungan

- (1) Seksi Jalan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyiapan administrasi teknik peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jalan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Bidang Jalan Lingkungan;
- b. Pelaksanaan kegiatan bimbingan di bidang Jalan Lingkungan
- c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang Jalan Lingkungan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase

- (1) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan pembangunan, pemeliharaan dan Pengendalian Sumber Daya Air dan Drainase.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan Operasional di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Drainase;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Drainase;
 - c. Pengoordinasian kegiatan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Drainase;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Drainase

- (1) Seksi Pemeliharaan sumber daya air dan drainase mempunyai tugas menyiapkan bahan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana pengelolaan sumber daya air dan drainase (Selokan, Drainase, Kanal dan Sungai).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan sumber daya air dan drainase menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air Dan Drainase;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air Dan Drainase;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Drainase;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase

- (1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas menyiapkan bahan pembangunan prasarana pengelolaan sumber daya air dan drainase (Selokan, Drainase, Kanal dan Sungai)
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan di Bidang Pembangunan Sumber Daya Air Dan Drainase;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembangunan Sumber Daya Air Dan Drainase;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase;

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Pengendalian Sumber Daya Air dan Drainase

- (1) Seksi Pengendalian Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian prasarana sumber daya air dan drainase.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Sumber Daya Air dan Drainase menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di Bidang Pengendalian Sumber Daya Air Dan Drainase;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengendalian Sumber Daya Air Dan Drainase;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang Pengendalian Sumber Daya Air dan Drainase;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Bidang Bina Teknik

- (1) Bidang Bina teknik mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan perencanaan dan desain, pengawasan dan manajemen konstruksi serta pembinaan jasa konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Teknik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan Operasional di Bidang Bina Teknik;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Bina Teknik;
 - c. Pengoordinasian kegiatan di Bidang Bina Teknik;

- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Bina Teknik;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Perencanaan dan Desain

- (1) Seksi Perencanaan desain mempunyai tugas melaksanakan pendataan, survey dan analisa perencanaan teknis jalan dan jembatan, prasarana lingkungan perumahan, sumber daya air dan drainase.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan desain menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di Bidang Perencanaan dan desain;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Perencanaan dan Desain;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan dan desain;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Pengawasan dan Manajemen Konstruksi

- (1) Seksi Pengawasan dan Manajemen Konstruksi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Manajemen Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di Bidang Pengawasan dan Manajemen Konstruksi;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang Pengawasan dan Manajemen Konstruksi;

- c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang Pengawasan dan Manajemen Konstruksi;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi

- (1) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan dan peningkatan jasa konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang Pembinaan Jasa konstruksi;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

UPTD Perbengkelan

- (1) UPTD Perbengkelan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap kerusakan kendaraan dan alat berat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perbengkelan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Perbengkelan;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Perbengkelan;
 - c. Melaksanakan pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap kerusakan kendaraan dan alat berat yang berada dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umum
 - d. Melaksanakan pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap kerusakan kendaraan dan alat berat yang dioperasikan untuk kebersihan kota;
 - e. Melaksanakan pengadaan/penyediaan barang kebutuhan dan peralatan bengkel;
 - f. Melaksanakan pengaturan, penyimpanan dan distribusi barang kebutuhan dan peralatan bengkel;
 - g. Melakukan pengeolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan/pemakaian peralatan, kendaraan dan alat berat yang berada dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umum;
 - h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

UPTD Penerangan Jalan

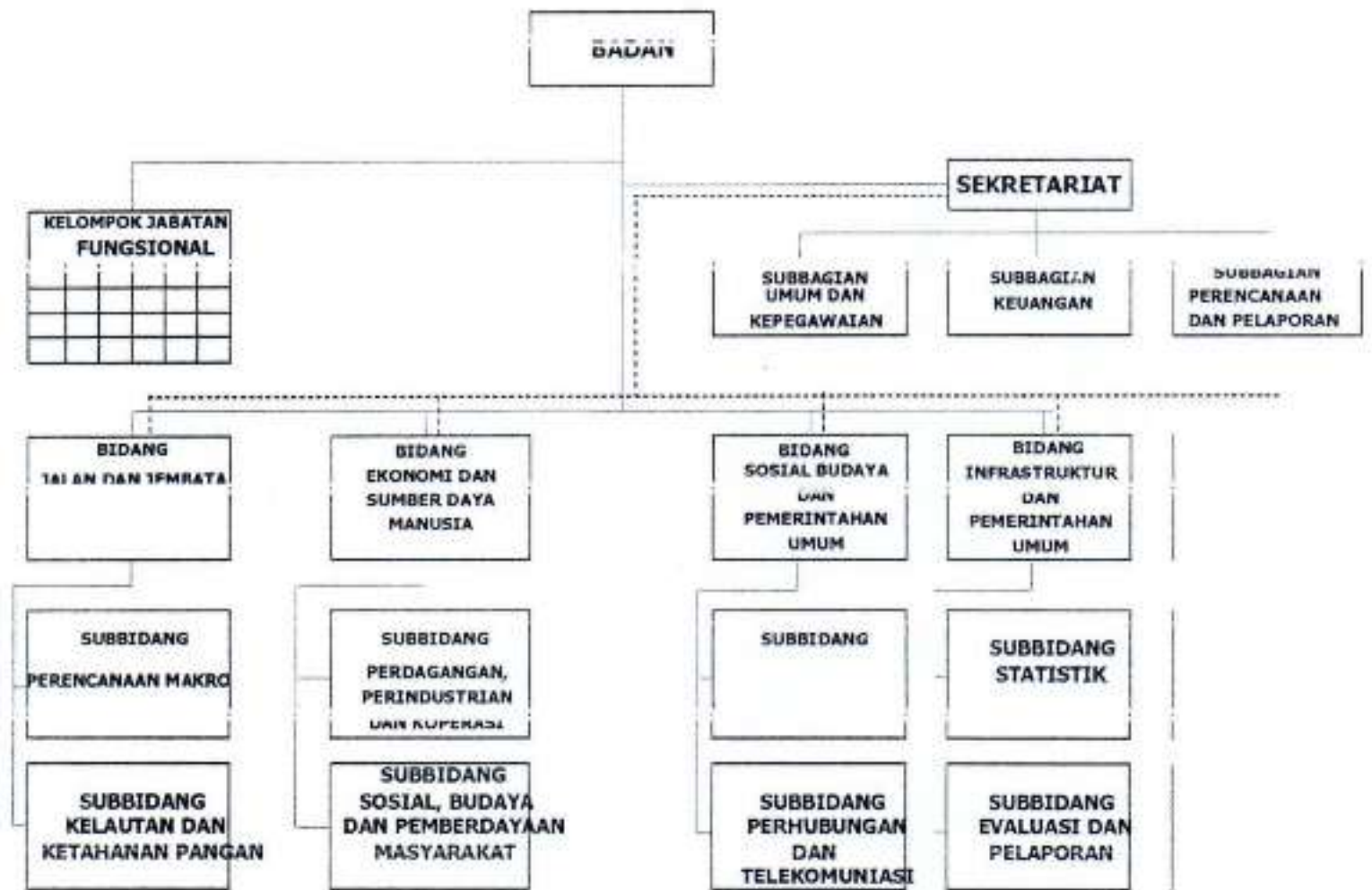
- (1) UPTD Penerangan Jalan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penataan pembangunan jaringan lampu jalan dan taman serta pemantauan/survey.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Penerangan Jalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Penerangan Jalan;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Penerangan Jalan;
 - c. Melakukan pemantauan/survey pembangunan dan pemeliharaan jaringan;
 - d. Melaksanakan pembangunan jaringan lampu jalan dan taman;
 - e. Melaksanakan pemeliharaan jaringan lampu jalan dan taman;
 - f. Melaksanakan pencatatan KWH meteran pemakaian daya Penerangan Lampu Jalan Umum (PJU);
 - g. Melaksanakan rekonsiliasi pembayaran tagihan listrik PJU dengan pihak terkait;
 - h. Melaksanakan pengawasan terhadap gudang dan peralatan kelistrikan;
 - i. Melaksanakan pendataan dalam rangka pemutakhiran data Penerangan Lampu Jalan Umum (PJU);
 - j. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 - k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

UPTD Pengelolaan Air Limbah

- (1) UPTD Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi perizinan, pendataan, pemutakhiran, evaluasi dan serta pengawasan pada gudang dan peralatan kelistrikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Air Limbah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Penerangan Jalan;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pengelolaan Air Limbah;
 - c. Melakukan pengelolaan dan pemanfaatan air limbah domestik/rumah tangga;
 - d. Melaksanakan penyedotan dan pengangkutan tinja, serta melakukan pengawasan terhadap penyedotan dan pengangkutan tinja oleh non pemerintah;
 - e. Melaksanakan pengelolaan lumpur tinja dan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT);
 - f. Melaksanakan operasionalisasi pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik/rumah tangga;
 - g. Melaksanakan pengendalian dan pembinaan kegiatan pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat;
 - h. Mengelola pungutan retribusi pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, pengembangan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan air limbah;
 - j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagan Susunan Organisasi Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar



D. LINGKUNGAN INTERNAL

1. Sumber Daya Aparatur

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan sumber daya manusia aparatur yang memadai sebanyak 481 orang dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

1. Pendidikan Doktor (S3) 1 orang
2. Magister (S2) sebanyak 24 orang
3. Pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 159 orang
4. Pendidikan D3 sebanyak 9 orang
5. Pendidikan SMA/ SMK sebanyak 179 orang
6. Pendidikan SMP sebanyak 37 orang.
7. Pendidikan SD sebanyak 72 orang

2. Keuangan

Ketersediaan anggaran belanja daerah yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tidak kalah pentingnya dalam menentukan pencapaian program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rencana kerja tahun 2018.

E. ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIK (SWOT)

Berdasarkan lingkungan internal yang telah disebutkan di atas bahwa kapasitas sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sangat besar potensinya karena didukung dengan tingkat pendidikan dan kemampuan manajerial staf / karyawan dan karyawan yang handal dengan didukung kualifikasi tingkat pendidikan dengan rata-rata tamatan tingkat magister dan sarjana.

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strong)

- Adanya kebijakan, pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman pada dasarnya sudah berada dalam koridor pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang sektor ke Puan yang menjamin adanya hak dasar rakyat untuk memperoleh pelayanan umum.
- Perda Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. Untuk menjabarkan Perda Nomor 3 tersebut maka disusun uraian tugas jabatan struktural pada Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar yang memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparatur Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar
- Struktur organisasi pada Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar terisi oleh Sumber daya manusia/staf yang mendukung pelaksanaan tugas - tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- Jumlah sarana dan prasarana yang memadai
- Adanya dukungan program dan SOP yang jelas bagi pelaksana program
- Adanya sistem pelaporan yang berjalan sesuai kesepakatan.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

- Dalam pelaksanaannya, Dinas pekerjaan umum kota makassar masih memiliki kelemahan yang menghambat kelancaran organisasi

dalam mencapai tujuannya. Hal ini dikarenakan Jumlah dan tingkat pendidikan pegawai yang tidak merata pada tiap-tiap bagian.

- Pengetahuan dan keterampilan pegawai yang tidak merata.
- Lemahnya manajemen SDM, Distribusi SDM profesional kurang merata dan pembinaan SDM yang tidak optimal
- Kurangnya kesempatan SDM untuk peningkatan profesionalisme di bidang ke PUan
- Pergantian stakeholder, sehingga kesinambungan pelaksanaan program tidak terjamin

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

- Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Makassar yang sudah tertata dengan baik
- Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang partisipatif di Kota Makassar dan menjadikan program infrastruktur merupakan program skala prioritas dalam pembangunan yang berkelanjutan di kota Makassar.
- Dukungan anggaran yang memadai sehingga program-program unggulan dapat terlaksana.
- Terjadinya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)
- Pemerintah Kota Makassar membuka peluang terhadap partisipatif peran serta dan kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam proses pelaksanaan pembangunan.

- Pemanfaatan sistem informasi manajemen yang cukup memadai sehingga dapat dihasilkan data akurat dan akuntabel sebagai bahan dalam proses penetapan kebijakan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (Threat)

- Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.
- Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan.
- Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
- Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat Kota Makassar.
- Masih adanya kebijakan yang kadang – kadang tidak berpihak pada masyarakat.

F. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I **PENDAHULUAN**, menjelaskan secara ringkas mengenai Latar Belakang, Aspek Strategik Organisasi, Struktur Organisasi, Lingkungan Internal, Analisa, Lingkungan Strategik dan Sistematika Penulisan.

Bab II **PERENCANAAN STRATEGIK** menjelaskan muatan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategik dan Perencanaan Kinerja 2018

- Bab III **AKUNTABILITAS KINERJA** menjelaskan indikator Kinerja, Metodologi Pengukuran Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi Dan Analisa Akuntabilitas Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.
- Bab IV **PENUTUP**, menjelaskan simpulan dari Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

RENCANA STRATEGIK

A. Visi

Sebelum merumuskan visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, perlu dikemukakan beberapa prinsip yang mendasari rumusan visi tersebut. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah bagian integral dari pemerintah kota makassar
2. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar terdiri dari bagian-bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang bervariasi
3. Bahwa keberadaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Makassar, memiliki interaksi dengan lingkungan strategis Kota Makassar, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perkembangan Kota Makassar.

Berdasarkan pada pertimbangan diatas, maka Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Umum yang Berkualitas dan Berkelas Dunia “.

Rumusan Visi tersebut dapat diinterpretasikan dan di ter makna sebagaimana berikut ini :

1. **Infrastruktur** : Mewujudkan Infrastruktur ke Puan dalam arti manajemen infrastruktur modern dan akuntabel.
2. **Pelayanan Umum** : Melayani secara umum untuk kepentingan umum/bersama.
3. **Berkualitas** : berkualitas artinya Infrastruktur sesuai standar yang ditetapkan pemerintah

4. **Berkerifan Lokal** : artinya sesuai dengan nilai budaya dan berdayaguna bagi masyarakat.

Sedangkan nilai yang terkandung didalam visi tersebut meliputi :

1. **Inovasi** : selalu membuat yang baru
2. **Partisipatif** : berpartisipasi/ ikut serta dalam setiap kegiatan
3. **Akuntabilitas** : bertanggung jawab

Visi ini berupaya menempatkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selaku institusi pelaksana teknis pembangunan infrastruktur di kota makassar yang profesional, sehingga pembangunan daerah dapat terlaksana secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat meningkatkan eksistensi Kota Makassar di masa depan.

B. Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun ke depan (2014-2019) yang bertumpu pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta ditunjang oleh semangat kebersamaan, tanggungjawab yang optimal dan proporsional, maka misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah :

1. Mengembangkan penanganan pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas dan berhasil guna;
2. Meningkatkan pembangunan bangunan air terpadu didukung sistem informasi data base untuk pelayanan yang berkesinambungan
3. Meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan dan bangunan pemerintah yang berkualitas;

4. Meningkatkan pelayanan ketenagalistrikan berbasis teknologi Informasi Guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan ramah lingkungan;
5. Meningkatkan kapasitas perencanaan, pengawasan pengendalian, pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelayanan publik bidang pekerjaan umum;

C. TUJUAN

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam penetapan tujuan-tujuan strategis, berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Tujuan utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas pengendalian banjir secara terpadu dalam peningkatan kualitas drainase/gorong-gorong pada bidang bangunan air untuk mewujudkan Makassar Kota Dunia yang aman dan nyaman untuk semua;
2. Meningkatkan Mutu infrastruktur pekerjaan umum dalam bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk mewujudkan infrastruktur bertaraf dunia;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur cakupan air bersih dan pelayanannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

4. Meningkatkan kualitas infrastruktur bangunan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat;
5. Terwujudnya Infrastruktur sistem air limbah yang berkualitas dan merata;
6. Peningkatan infrastruktur penerangan lampu jalan dengan cara pengadaan lampu jalan di setiap jalan dan lorong untuk mewujudkan kota dunia yang nyaman dan aman;
7. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kebinamargaan
8. Tercapainya peningkatan kapasitas dan kinerja yang akuntabel;
9. Peningkatan kinerja pelayanan publik;
10. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi.

Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang masih dihadapi dalam lima tahun ke depan serta untuk menjawab pernyataan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

✓ SASARAN

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam periode 2014-2019 secara keseluruhan akan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut :

- ✓ Meningkatnya kualitas drainase permukiman perkotaan;
- ✓ Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan;
- ✓ Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

- ✓ Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung pemerintah;
- ✓ Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman;
- ✓ Meningkatnya layanan penerangan lampu jalan;
- ✓ Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kebinamargaan;
- ✓ Tersedianya dokumen perencanaan, pengawasan teknis dan layanan ijin usaha jasa konstruksi (IUJK);
- ✓ Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas;
- ✓ Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah;

D. PERENCANAAN KINERJA 2019

Program dan kegiatan yang akan dijabarkan dalam rencana Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar tahun 2018 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2014-2019 yang disusun secara strategis dengan memperhatikan visi, misi dan perubahan kondisi strategis lingkup organisasi Dinas pekerjaan Umum. Rencana kinerja tahun 2018 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Program dan kegiatan yang akan uraikan adalah merupakan program dan kegiatan utama yang bukan diperuntukkan untuk membiayai sifatnya rutin dalam rencana kinerja yaitu sebagai berikut:

A. PROGRAM UTAMA

Terdiri dari program kegiatan:

- (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- (2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;

- (3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- (4) Program Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan;
- (5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- (6) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih;
- (7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah;
- (8) Program Pengendalian Banjir;
- (9) Program Pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah
- (10) Program Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah;
- (11) Program Pengadaan Lampu Jalan;
- (12) Program Rehabilitasi/pemeliharaan lampu jalan;
- (13) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- (14) Program Bina Teknik

B. Program pendukung :

Terdiri dari program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM Tahun 2010

Tabel.15.Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. M. ANSAR, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : MOH. KAMDHAN POMANTO

Jabatan : WALIKOTA MAKASSAR

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Kedua,


MOH.RAMDHAN POMANTO

Pihak Pertama,


IR. M. ANSAR, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas	Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran	100%
2	Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan	Jumlah panjang jalan yang dibangun	40 km
		Jumlah jembatan yang dibangun	7 buah
3	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung pemerintah	Jumlah bangunan pemerintah yang terbangun	8 unit
		Jumlah bangunan pemerintah yang di rehabilitasi	24 unit
4	Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Jumlah titik sarana dan prasarana air bersih yang di bangun	8 titik
		Jumlah rumah tangga kumuh/miskin yang terjangkau air bersih	1377 SR
5	Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman	Jumlah Rumah tangga yang terakses sanitasi layak	400 RT / SR
		Persentase sarana dan prasarana IPAL dalam kondisi baik	75,61%
6	Meningkatnya kualitas drainase permukiman perkotaan	Jumlah titik genangan yang dikurangi tinggi, luas dan lama genangan	5 titik genangan
		Jumlah panjang Box culvert yang terpasang	15 km
7	Tersedianya dokumen perencanaan, pengawasan teknis dan layanan ijin usaha jasa konstruksi (IUJK)	Presentasi tersedianya layanan IUJK	100%
8	Meningkatnya layanan penerangan lampu jalan	Cakupan Ketersediaan Lampu Jalan	88%
9	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kebinamargaan	Cakupan ketersediaan peralatan alat-alat berat dalam kondisi baik	90%

	PROGRAM		ANGGARAN
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp	9.671.392.800,00
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp	26.354.363.400,00
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp	291.500.000,00
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp	675.087.500,00
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	3.813.343.280,00
6.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp	37.487.187.525,00
7.	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Rp	56.787.718.800,00
8.	Program Pengendalian Banjir	Rp	18.500.264.600,00
9.	Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp	6.450.000.000,00
10.	Program pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp	255.538.537.570,00
11.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Rp	5.141.492.350,00
12.	Program penyediaan dan pengelolaan air bersih	Rp	17.630.560.000,00
13.	Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan	Rp	40.562.757.745,00
14.	Program pengadaan lampu jalan	Rp	45.589.750.000,00
15.	program rehabilitasi/pemeliharaan lampu jalan	Rp	87.238.522.200,00
16.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah	Rp	19.204.343.500,00

17	Program pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah	Rp	96.332.806.000,00
18	Program Bina Teknik	Rp	27.043.910.100,00
		Rp	754.313.537.370,00

Makassar, Januari 2019

Walikota Makassar,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Makassar



Ir. M. ANSAR, M.Si

Nip : 196305171992031004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANSUARD, ST, M.Si

Jabatan : KABID. BINA TEKNIK

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : IR. M. ANSAR, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Kedua,

IR. M. ANSAR, M.Si

Pihak Pertama,

ANSUARD, ST. M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program Bina Teknis	persentase rekomendasi ijin usaha jasa konstruksi	100%
1	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Air dan Drainase	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan bangunan air dan drainase yang tersedia	11 dokumen
2	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan bangunan jalan dan jembatan yang tersedia	26 dokumen
3	Perencanaan Teknis Pembangunan UPTD	Jumlah dokumen perencanaan teknis dalam pembangunan yang dilakukan UPTD	7 dokumen
4	Pengukuran dan Pemetokan Jalan	Jumlah laporan hasil pengukuran dan pematokan jalan	1 dokumen
5	Review Desain Gedung Pemerintah Mengacu Konsep Green Building	Jumlah dokumen hasil review desain gedung pemerintah yang telah mengacu pada konsep green building	1 dokumen
6	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Pemerintah	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan yang tersedia	32 dokumen
7	Penyusunan Dokumen Lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan yang tersusun	4 dokumen
8	Penyusunan Leger Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen leger dan jembatan yang tersusun	1 dokumen
9	Review Penyerasian Hasil Usulan Masyarakat	Jumlah usulan masyarakat yang terakomodir menjadi skala prioritas	200 usulan
10	Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen pengawasan pembangunan drainase perkantoran yang tersusun	27 dokumen
11	Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen pengawasan pembangunan jalan dan jembatan yang tersusun	49 dokumen
12	Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan UPTD	Jumlah dokumen pengawasan teknik pembangunan UPTD yang tersusun	12 dokumen
13	Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Pemerintah	Jumlah dokumen pengawasan teknis pembangunan gedung pemerintah yang tersusun	48 dokumen
14	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA)	Jumlah rekomendasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan (RUMIJA) dikeluarkan	30 rekomendasi
15	Pembinaan dan Peningkatan Jasa Konstruksi	Jumlah rekomendasi dokumen ijin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan dan terverifikasi	800 rekomendasi
16	Sayembara Desain Infrastruktur Kota	Jumlah desain infrastruktur kota yang mengikuti sayembara	1 dokumen
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten di bidangnya	100%
17	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengawasan ke PU-an	Laporan bimbingan teknik perencanaan dan pengawasan ke PU-an	50 orang
18	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur ke Puan	Terlaksananya Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ke Puan	75 orang
III	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Cakupan peralatan alat-alat berat dalam kondisi baik	88%
19	Bimbingan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bengkel (K3)	Terlaksananya bimbingan kesehatan dan keselamatan kerja bengkel (K3)	75 orang
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Cakupan peralatan alat-alat berat dalam kondisi baik	88%
20	Penyusunan standar harga satuan ke PU-an	Jumlah dokumen sebagai acuan dalam penyusunan harga bahan ke PU-an	4 dokumen

Program		Anggaran
1. Program Bina Teknis	Rp	27.043.910.100,00
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	459.988.500,00
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp	141.711.750,00
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	114.718.800,00

Makassar, Januari 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

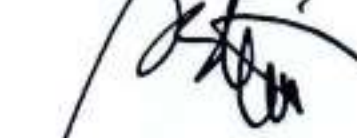
Kota Makassar



Ir. M. Ansar, M.Si

Nip : 19630517 199203 1 004

Kabid. Bina Teknik



Ansuard, ST, M.Si

Nip: 19691031 200312 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURIADY, ST, M.Si

Jabatan : KASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : ANSUARD, ST, M Si

Jabatan : KABID BINA TEKNIK

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

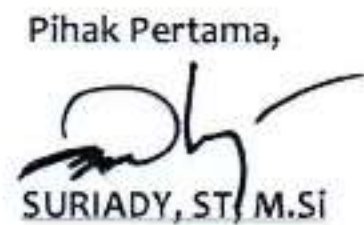
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Kedua,

ANSUARD, ST, M Si

Pihak Pertama,

SURIADY, ST, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRISNA WAHYUNI YUNUS, ST

Jabatan : KASI PERENCANAAN DAN DESAIN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : ANSUARD, ST, M Si

Jabatan : KABID BINA TEKNIK

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Pertama,

TRISNA WAHYUNI YUNUS, ST

Pihak Kedua,

ANSUARD, ST, M SI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Air dan Drainase	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan bangunan air dan drainase yang tersedia	11 dokumen
2.	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan bangunan jalan dan jembatan yang tersedia	26 dokumen
3.	Perencanaan Teknis Pembangunan UPTD	Jumlah dokumen perencanaan teknis dalam pembangunan yang dilakukan UPTD	7 dokumen
4.	Pengukuran dan Pemetokan Jalan	Jumlah laporan hasil pengukuran dan pematokan jalan	1 dokumen
5.	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Pemerintah	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan yang tersedia	32 dokumen
6.	Penyusunan Dokumen Lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan yang tersusun	4 dokumen
7.	Penyusunan Leger Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen leger dan jembatan yang tersusun	1 dokumen
8.	Review Penyerasian Hasil Usulan Masyarakat	Jumlah usulan masyarakat yang terakomodir menjadi skala prioritas	200 usulan

Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Air dan Drainase	Rp 2.165.781.000,00
2. Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 3.162.076.000,00
3. Perencanaan Teknis Pembangunan UPTD	Rp 997.081.000,00
4. Pengukuran dan Pemetokan Jalan	Rp 417.805.500,00
5. Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Pemerintah	Rp 2.900.000.000,00
6. Penyusunan Dokumen Lingkungan	Rp 671.606.000,00
7. Penyusunan Leger Jalan dan Jembatan	Rp 1.677.686.000,00
8. Review Penyerasian Hasil Usulan Masyarakat	Rp 1.159.376.000,00

Kepala Bidang Bina Teknik



Anuarda, ST, M.Si

Nip: 19691031 200312 1 001

Makassar, Januari 2019

Kepala Seksi Perencanaan dan Desain



Trisna Wahyuni Yunus, ST

Nip: 19740619 200901 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAJAR ASWAD, ST, M.Si

Jabatan : KASI PENGAWASAN DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : ANSUARD, ST, M Si

Jabatan : KABID BINA TEKNIK

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Pertama,

HAJAR ASWAD, ST, M.Si

Pihak Kedua,

ANSUARD, ST, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen pengawasan pembangunan drainase perkantoran yang tersusun	27 dokumen
2.	Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen pengawasan pembangunan jalan dan jembatan yang tersusun	49 dokumen
3.	Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan UPTD	Jumlah dokumen pengawasan teknik pembangunan UPTD yang tersusun	12 dokumen
4.	Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Pemerintah	Jumlah dokumen pengawasan teknis pembangunan gedung pemerintah yang tersusun	48 dokumen
5.	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA)	Jumlah rekomendasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan (RUMIJA) dikeluarkan	30 rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Perkotaan	Rp 2.472.746.400,00
2. Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 4.327.748.000,00
3. Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan UPTD	Rp 1.127.720.000,00
4. Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Pemerintah	Rp 3.135.000.000,00
5. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA)	Rp 277.810.800,00

Kepala Bidang Bina.Teknik



Ansuard, ST, M.Si

Nip: 19691031 200312 1 001

Makassar, Januari 2019

Kasi Pengawasan & Manajemen Kontruksi



M. Hajar Aswad, ST, M.Si

Nip: 19760212 200901 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAJUDDIN, ST, M.Si

Jabatan : KABID. JALAN DAN JEMBATAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : IR. M. ANSAR, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Kedua,

IR. M. ANSAR, M.Si

Pihak Pertama,

TAJUDDIN, ST, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan yang diperbaiki	25 Km
		Panjang Jembatan yang diperbaiki	7 Buah
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan APBD II	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan menggunakan sumber Dana APBD	108 Ruas
2	Pembangunan trotoar	Panjang Trotoar yang dibangun	4 KM
3	Penataan simpang jalan	Jumlah titik simpang jalan yang ditingkatkan	4 Titik
4	Sarana dan Prasarana Jalan (DAK)	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan menggunakan sumber Dana DAK	3 Ruas
5	Rehabilitasi/pemeliharaan Trotoar	Jumlah Ruas jalan yang memiliki Trotoar dalam kondisi baik	2 Ruas
6	Pemeliharaan jalan kota	Jumlah Ruas Jalan Kota Yang Terpelihara	100 Ruas
7	Inpeksi Jalan kota	Jumlah Dokumen Hasil Inspeksi Jalan Kota	14 Dok.
8	Rehabilitasi/pemeliharaan Median Jalan	Jumlah ruas jalan yang memiliki median jalan dalam kondisi baik	5 Ruas
9	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	Jumlah jembatan dalam kondisi baik	7 Buah
10	Sarana dan Prasarana Jalan (DID)	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan	3 Ruas
2.	Program pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	2,6 Km
		Jumlah Jembatan yang dibangun	7 Buah
11	Pembangunan jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	7 buah
12	Pembangunan Jalan (Hibah kepada masy / Pihak ketiga)	ruas Jalan yang terbangun untuk di Hibahkan (Yang tidak termasuk Aset Pemkot)	1 Ruas
3.	Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan	Cakupan Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	65%
13	Pembangunan jalan lingkungan	Jumlah panjang jalan lingkungan yang terbangun	200 Ruas
14	Pemeliharaan jalan lingkungan	Jumlah ruas jalan lingkungan dalam kondisi baik	100 Ruas
15	Pembangunan Infrastruktur Lorong	Jumlah jalan lingkungan yang memiliki penutup saluran	153 ruas

Program

Anggaran

1.	Program pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp	255.538.537.570,00
2.	Program pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp	6.450.000.000,00
3.	Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan	Rp	38.993.649.845,00

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kota Makassar


Ir. M. Ansar, M.Si

Nip : 19630517 199203 1 004

Makassar, Januari 2019

Kabid. Jalan dan Jembatan


Tajuddin, ST, M.Si

Nip: 19660904 199208 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MAPPASOMBA, ST, MM

Jabatan : KASI. JALAN LINGKUNGAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : TAJUDDIN, ST, M. Si

Jabatan : KABID. JALAN DAN JEMBATAN

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

TAJUDDIN, ST, M. SI

Makassar, Januari 2019

Pihak Pertama,

H. MAPPASOMBA, ST, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembangunan jalan lingkungan	Jumlah panjang jalan lingkungan yang terbangun	200 ruas
2.	Pemeliharaan jalan lingkungan Kota	Jumlah ruas jalan lingkungan dalam kondisi baik	100 ruas
3.	Pembangunan Infrastruktur Lorong	Jumlah jalan lingkungan yang memiliki penutup saluran	153 ruas

Program	Anggaran
1. Pembangunan jalan lingkungan	Rp 28,139,489,845.00
2. Pemeliharaan jalan lingkungan	Rp 7,472,586,000.00
3. Pembangunan infrastruktur Lorong	Rp 3,301,574,000.00

Makassar, Januari 2019

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan

Kota Makassar



Tajuddin, ST, M.Si

Nip 19660904 199208 1 001

Kepala Seksi Jalan Lingkungan

Kota Makassar



H. Mappasomba, SI, MM

Nip 19610504 198408 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARLIS, ST, MM

Jabatan : KASI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : TAJUDDIN, ST, M. Si

Jabatan : KABID JALAN DAN JEMBATAN

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Kedua,


TAJUDDIN, ST, M. Si

Pihak Pertama,


DARLIS, ST, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

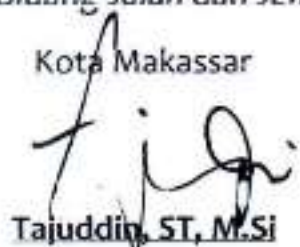
NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan APBD II	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan menggunakan sumber Dana APBD	108 Ruas
2.	Pembangunan trotoar	Panjang Trotoar yang dibangun	4 Km
3.	Penataan simpang jalan	Jumlah titik simpang jalan yang ditingkatkan	4 Titik
4.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan (DAK)	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan menggunakan sumber Dana DAK	3 Ruas
5.	Rehabilitasi/pemeliharaan Median Jalan	Jumlah ruas jalan yang memiliki median jalan dalam kondisi baik	5 Ruas
6.	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	Jumlah jembatan dalam kondisi baik	7 Buah
7.	Sarana dan Prasarana Jalan (DID)	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan	3 Ruas
8.	Pembangunan jalan (hibah kepada masy / Pinak ketiga	ruas Jalan yang terbangun untuk di Hibahkan (Yang tidak termasuk Aset Pemkot)	1 Ruas
9.	Pembangunan jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	7 Buah

Kegiatan	Anggaran
1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan APBD II	Rp 195,263,374,370
2. Pembangunan trotoar	Rp 20,259,054,000
3. Penataan simpang jalan	Rp 1,000,000,000
4. Sarana dan Prasarana Jalan (DAK)	Rp 11,688,435,000
5. Rehabilitasi/pemeliharaan Median Jalan	Rp 1,000,000,000
6. Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	Rp 500,000,000
7. Sarana dan Prasarana Jalan (DID)	Rp 13,387,468,000
8. Pembangunan jembatan	Rp 5,500,000,000.00
9. 'Pembangunan jalan (hibah kepada masy / Pinak ketiga)	Rp 950,000,000.00

Makassar, Januari 2019

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan


Kota Makassar


Tajuddin, ST, M.Si

Nip 19660904 199208 1 001

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kota Makassar


Darlis, ST, MM

Nip 19651208 199203 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI ASHAM, ST, MM

Jabatan : KASI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : TAJUDDIN, ST, M. Si

Jabatan : KABID JALAN DAN JEMBATAN

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Kedua,

TAJUDDIN, ST, M. Si

Pihak Pertama,

ANDI ASHAM, ST, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rehabilitasi/pemeliharaan Trotoar	Jumlah Ruas jalan yang memiliki Trotoar dalam kondisi baik	2 Ruas
2.	Pemeliharaan jalan kota	Jumlah Ruas Jalan Kota Yang Terpelihara	100 Ruas
3.	Inpeksi Jalan kota	Jumlah Dokumen Hasil Inspeksi Jalan Kota	14 Dok.

Kegiatan	Anggaran
1. Pemeliharaan jalan kota	Rp 11,457,041,000
2. Inpeksi Jalan kota	Rp 333,431,200
3. Rehabilitasi/pemeliharaan Trotoar	Rp 649,734,000

Makassar, Januari 2019

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan

Kota Makassar

Tajuddin, ST, M.Si
 Nip 19660904 199708 1 001

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan & Jembatan

Kota Makassar

Andi Ashari, ST, MM
 Nip 19651209 199103 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZUHAELSI ZUBIR, ST,MT

Jabatan : KABID. PRASARANA DAN BANGUNAN PEMERINTAH

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : IR. M. ANSAR, M.Si

Jabatan : ^{Ph.} KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

IR. M. ANSAR, M.Si

Makassar, Januari 2019

Pihak Pertama,

ZUHAELSI ZUBIR, ST,MT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah	Jumlah Bangunan Pemerintah yang Terbangun	19 Unit
		Jumlah Bangunan Pemerintah yang di Rehabilitasi	23 unit
1	Pembangunan Gedung Pemerintah	Jumlah gedung pemerintah yang dibangun	19 Unit
2	Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah	Jumlah aplikasi Sistem Penyimpanan Data dan informasi bidang prasarana dan bangunan pemerintah	1 Aplikasi
3	Penataan Kaki Lima Kota Makassar	Jumlah lokasi tempat berjualan penataan kaki lima yang tertata di Kota Makassar	1 Lokasi
4	Pembangunan Gedung Pemerintah (Hibah)	Jumlah gedung pemerintah yang dibayar	1 Paket
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sedang/Berat Bangunan Milik Pemerintah	Jumlah bangunan milik pemerintah yang direhabilitasi	23 Unit
6	Pemantauan Bangunan Gedung Pemerintah	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang dipantau	15 Unit
7	Taksasi Bangunan Gedung/Rumah Saranan dan Prasarana Umum	Bangunan gedung/rumah sarana dan prasarana umum yang ditaksasi	25 Unit
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Prasarana Pemerintah	Jumlah prasarana pemerintah yang di Rehabilitasi	1 Unit
9	Penataan Anjungan Pantai Losari	Jumlah Lokasi Anjungan Pantai Losari Tertata	4 Lokasi
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung Tempat Kerja	Jumlah pemeliharaan & perbaikan gedung tempat kerja setiap tahun	1 Unit
11	Pembangunan Gedung Pemerintah (DID)	Jumlah Gedung Pemerintah yang dibangun (DID)	5 unit
12	Rehabilitasi sedang/berat gedung / fasilitas pemerintah. (hibah kepada masyarakat/pihak ketiga)	Jumlah gedung yang direhabilitasi	1 unit
II	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih	Jumlah titik sarana dan prasarana air bersih yang terbangun	4 titik
		Jumlah Rumah Tangga kumuh/miskin yang terjangkau air bersih	1377 SR
13	Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih	Jumlah sarana dan prasarana air bersih	5 Unit
14	Sosialisasi Sarana & Prasarana Air Bersih	Jumlah peserta sosialisasi sarana dan prasarana air	400 Orang
15	Lomba Pengelolaan air bersih di tingkat masyarakat	Jumlah pemenang lomba pengelolaan air bersih tingkat masyarakat	6 Pemenang
16	Pelatihan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Jumlah peserta pelatihan sarana dan prasarana air bersih	200 Orang
17	Penguatan Kelembagaan Badan Pengelolaan Air Bersih	Jumlah badan pengelola air bersih bermasalah dapat diberdayakan aktif dan mandiri	10 Kelembagaan
18	Sarana dan Prasarana Penugasan Air Bersih (DAK)	Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana air bersih (DAK)	4 titik
19	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Jumlah sarana dan prasarana air bersih	5 unit
III	Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Rumah Tangga yang terakses sanitasi layak	120 SR
		Persentase sarana dan prasarana IPAL dalam Kondisi Baik	75,61%
20	Workshop pokjasan kelompok kerja sanitasi masyarakat	Jumlah peserta workshop pokjasan sanitasi masyarakat	200 Orang

21	Workshop pengelolaan & pemeliharaan Sarana dan prasarana Sanitasi	Jumlah peserta yang mengikuti workshop pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi	200 Orang
22	Sosialisasi Sewerage System Perkantoran	Jumlah peserta sosialisasi sewerage sistem perkotaan	200 Orang
23	Sosialisasi IPAL kawasan/Komunal	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi IPAL kawasan/komunal	320 Orang
24	Pembangunan Jaringan IPAL Sambungan Rumah	Jaringan IPAL sambungan rumah yang terbangun	120 SR
25	Pembangunan IPAL Kantor Pemerintahan	Jumlah IPAL kantor pemerintah yang terbangun	2 Unit
26	Inpeksi Sarana Prasarana Sanitasi dan Air Bersih	Lokasi pelaksanaan inpeksi sarana prasarana sanitasi dan air bersih	6 Kec
27	Pembangunan Infrastruktur sanitasi (DAK)	Jumlah titik pembangunan infrastruktur sanitasi (DAK)	2 titik
28	Pembangunan IPAL Losari	Jumlah lokasi pekerjaan pemb. IPAL Losari yang terbangun	1 Lokasi
29	Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan)	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi DAK yang terbangun	5 Lokasi

	Program	Anggaran
1.	Program pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah	Rp 96.332.806.000,00
2.	Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Limbah	Rp 14.510.156.000,00
3.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih	Rp 17.630.560.000,00

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Makassar



Ir. M. Ansar, M.Si

Nip : 19630517 199203 1 004

Makassar, Januari 2019

Kepala Bidang Prasarana dan Gedung Pemerintah



Zuhaelsi Zubir, ST, MT

Nip: 19770707 200212 2 011

21	Workshop pengelolaan & pemeliharaan Sarana dan prasarana Sanitasi	Jumlah peserta yang mengikuti workshop pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi	200 Orang
22	Sosialisasi Sewerage System Perkantoran	Jumlah peserta sosialisasi sewerage sistem perkotaan	200 Orang
23	Sosialisasi IPAL kawasan/Komunal	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi IPAL kawasan/komunal	320 Orang
24	Pembangunan Jaringan IPAL Sambungan Rumah	Jaringan IPAL sambungan rumah yang terbangun	120 SR
25	Pembangunan IPAL Kantor Pemerintahan	Jumlah IPAL kantor pemerintah yang terbangun	2 Unit
26	Inpeksi Sarana Prasarana Sanitasi dan Air Bersih	Lokasi pelaksanaan inpeksi sarana prasarana sanitasi dan air bersih	6 Kec
27	Pembangunan Infrastruktur sanitasi (DAK)	Jumlah titik pembangunan infrastruktur sanitasi (DAK)	2 titik
28	Pembangunan IPAL Losari	Jumlah lokasi pekerjaan pemb. IPAL Losari yang terbangun	1 Lokasi
29	Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan)	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi DAK yang terbangun	5 Lokasi

	Program	Anggaran
1.	Program pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah	Rp 96.332.806.000,00
2.	Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Limbah	Rp 14.510.156.000,00
3.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih	Rp 17.630.560.000,00

P/h
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 Kota Makassar

 Ir. M. Ansar, M.Si
 Nip : 19630517 199203 1 004

Makassar, Januari 2019
 Kepala Bidang Prasarana dan Gedung Pemerintah

 Zuhaelsi Zubir, ST, MT
 Nip: 19770707 200212 2 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHAIR, ST

Jabatan : KASI PEMELIHARAAN GEDUNG PEMERINTAH

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : ZUHAELSI ZUBIR, ST, MT

Jabatan : KABID. PRASARANA DAN BANGUNAN PEMERINTAH

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ZUHAELSI ZUBIR, ST, MT

Makassar, Januari 2019

Pihak Pertama,

SUHAIR, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sedang/Berat Bangunan Milik Pemerintah	Jumlah bangunan milik pemerintah yang direhabilitasi	23 Unit
2	Taksasi Bangunan Gedung/Rumah Saranan dan Prasarana Umum	Bangunan gedung/rumah sarana dan prasarana umum yang ditaksasi	25 Unit
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Prasarana Pemerintah	Jumlah prasarana pemerintah yang di Rehabilitasi	1 Unit
4	Penataan Anjungan Pantai Losari	Jumlah Lokasi Anjungan Pantai Losari Tertata	4 Lokasi
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/fasilitas Pemerintah (Hibah kepada masyarakat/pihak ketiga)	Jumlah bangunan gedung pemerintah (Hibah kepada masy)	1 unit
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung Tempat Kerja	Jumlah pemeliharaan & perbaikan gedung tempat kerja setiap tahun	1 Unit

Kegiatan

Anggaran

1.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sedang/Berat Bangunan Milik Pemerintah	Rp	6.444.997.000,00
2.	Taksasi Bangunan Gedung/Rumah Saranan dan Prasarana Umum	Rp	261.717.000,00
3.	Rehabilitasi Sedang/Berat Prasarana Pemerintah	Rp	1.529.153.000,00
4.	Penataan Anjungan Pantai Losari	Rp	596.545.000,00
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp	1.663.505.000,00
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/fasilitas Pemerintah (Hibah kepada masyarakat/pihak ketiga)	Rp	11.000.255.000,00

Makassar, Januari 2019

Kepala Bidang Prasarana dan Gedung Pemerintah



Zuhaelsi Zubir, ST, MT

Nip: 19770707 200212 2 011

Kasi Pemeliharaan Gedung Pemerintah



Suhair, ST

Nip: 1960531 200212 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JULI NURUL, ST

Jabatan : KASI PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : ZUHAELSI ZUBIR, ST, MT

Jabatan : KABID. PRASARANA DAN BANGUNAN PEMERINTAH

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Kedua,

ZUHAELSI ZUBIR, ST, MT

Pihak Pertama,

JULI NURUL, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembangunan Gedung Pemerintah	Jumlah gedung pemerintah yang dibangun	19 Unit
2.	Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah	Jumlah aplikasi Sistem Penyimpanan Data dan Informasi bidang prasarana dan bangunan pemerintah	1 Aplikasi
3.	Penataan Kaki Lima Kota Makassar	Jumlah lokasi tempat berjualan penataan kaki lima yang tertata di Kota Makassar	1 Lokasi
4.	Pemantauan Bangunan Gedung Pemerintah	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang dipantau	15 Unit
5.	Pembangunan Gedung Pemerintah (Hibah)	Jumlah gedung pemerintah yang dibayar	1 Unit
6.	Pembangunan Gedung Pemerintah (DID)	Jumlah gedung pemerintah yang dibangun	5 Unit

Kegiatan

Anggaran

1.	Pembangunan Gedung Pemerintah	Rp	32.356.042.000,00
2.	Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah	Rp	136.906.000,00
3.	Penataan Kaki Lima Kota Makassar	Rp	16.208.450.000,00
4.	Pemantauan Bangunan Gedung Pemerintah	Rp	322.759.000,00
5.	Pembangunan Gedung Pemerintah (Hibah)	Rp	2.212.771.000,00
6.	Pembangunan Gedung Pemerintah (DID)	Rp	23.599.706.000,00

Makassar, Januari 2019

Kepala Bidang Prasarana dan Gedung Pemerintah



Zuhaelsi Zubir, ST, MT

Nip: 19770707 200212 2 011

Kasi Pembangunan Gedung Pemerintah



Juli Nurul, ST

Nip: 19720707 200801 2 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Workshop pokjasan kelompok kerja sanitasi masyarakat	Jumlah pesertase workshop pokjasan sanitasi masyarakat	200 Orang
2.	Workshop pengelolaan & pemeliharaan Sarana dan prasarana Santasi	Jumlah peserta yang mengikuti workshop pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi	200 Orang
3.	Sosialisasi Sewerage System Perkantoran	Jumlah peserta sosialisasi sewerage sistem perkotaan	200 Orang
4.	Sosialisasi IPAL kawasan/Komunal	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi IPAL kawasan/komunal	320 Orang
5.	Pembangunan Ipal Losari	Jumlah lokasi IPAL losari yang terbangun	1 lokasi
6.	Pembangunan Jaringan IPAL Sambungan Rumah	Jaringan IPAL sambungan rumah yang terbangun	120 SR
7.	Pembangunan IPAL Kantor Pemerintahan	Jumlah IPAL kantor pemerintah yang terbangun	2 Unit
8.	Inpeksi Sarana Prasarana Sanitasi dan Air Bersih	Lokasi pelaksanaan inpeksi sarana prasarana sanitasi dan air bersih	6 Kecamatan
9.	Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan)	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi DAK yang terbangun	5 Lokasi
10.	Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih	Jumlah sarana dan prasarana air bersih	5 Unit
11.	Sosialisasi Sarana & Prasarana Air Bersih	Jumlah peserta sosialisasi sarana dan prasarana air	400 Orang
12.	Lomba Pengelolaan air bersih di tingkat masyarakat	Jumlah pemenang lomba pengelolaan air bersih tingkat masyarakat	6 Pemenang
13.	Pelatihan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Jumlah peserta pelatihan sarana dan prasarana air bersih	200 Orang
14.	Penguatan Kelembagaan Badan Pengelolaan Air Bersih	Jumlah badan pengelola air bersih bermasalah dapat diberdayakan aktif dan mandiri	10 Kelembagaan
15.	Sarana dan Prasarana Penugasan Air Bersih (DAK)	Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana air bersih (DAK)	4 titik
16.	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Air bersih	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dipelihara dengan baik	5 unit
17.	Pembangunan Infrastruktur sanitasi (DAK)	Jumlah titik pembangunan infrastruktur sanitasi (DAK)	2 titik

Kegiatan

Anggaran

1.	Workshop pokjasan kelompok kerja sanitasi masyarakat	Rp	173.769.500,00
2.	Workshop pengelolaan & pemeliharaan Sarana dan prasarana Santasi	Rp	282.319.000,00
3.	Sosialisasi Sewerage System Perkantoran	Rp	454.321.000,00
4.	Sosialisasi IPAL kawasan/Komunal	Rp	336.467.500,00
5.	Pembangunan IPAL Losari	Rp	4.741.020.500,00
6.	Pembangunan Jaringan IPAL Sambungan Rumah	Rp	1.350.219.000,00
7.	Pembangunan Infrastruktur sanitasi (DAK)	Rp	871.320.000,00



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. SYAFAR MADJID, ST

Jabatan : Plt. KABID. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : IR. M. ANSAR, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

IR. M. ANSAR, M.Si

Makassar, Januari 2019

Pihak Pertama,

MOH. SYAFAR MADJID, ST

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah Titik Genangan yang dikurangi titik, luas dan lama genangan	5 titik genangan yang dikurangi
		Jumlah Panjang Box Culvert yang terpasang	15 Km
1	Inspeksi Kondisi Drainase ✓	Jumlah dokumen kondisi drainase yang tersusun	1 dokumen
2	Pembangunan Drainase Perkotaan ✓	Jumlah panjang drainase perkotaan yang terbangun	28 Km
II	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	50% Panjang saluran yang berfungsi dengan baik dari total panjang saluran (3.234 KM)	10%
3	Rehabilitasi saluran drainase /gorong-gorong ✓	Panjang saluran sekunder dan tersier yang direhab	30 km
4	Gerakan Bersih Saluran Drainase (GBSD) ✓	Jumlah lokasi/kelurahan kegiatan GBSD Kota Makassar	10 lokasi
5	Pemeliharaan Rutin Berkala Saluran Drainase/Gorong-gorong ✓	Panjang saluran yang berfungsi optimal	70 km
III	Program Pengendalian banjir	24 Rumah pompa dan Pintu Air	2 unit
		Panjang kanal yang dinormalisasi/dikeruk dan diperbaiki	10 km
6	Normalisasi/Pengerukan Kanal Kota Makassar ✓	Panjang kanal yang dinormalisasi/dikeruk dan diperbaiki	10 km
7	Pembangunan rumah pompa & pintu Air ✓	Jumlah rumah pompa dan pintu air yang terbangun	2 unit
8	Operasional Pengelolaan pintu air ✓	Jumlah rumah pompa dan pintu air dalam keadaan baik dan berfungsi optimal	15 unit
9	Rehabilitasi sedang/Berat dermaga ✓	Jumlah dermaga yang direhabilitasi	1 dermaga
10	Pembangunan tanggul dan talud ✓	Panjang tanggul dan talud yang dibangun	350 meter
11	Rehabilitasi sedang/berat rumah pompa & pintu Air ✓	Jumlah rumah pompa dan pintu air yang diperbaiki	4 unit
12	Pembangunan Kolam Resapan dan Kolam Retensi ✓	Pembangunan Kolam resapan dan kolam retensi	5 Aqua Pound dan 1 kolam retensi
IV	Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan	Cakupan jalan lingkungan dalam kondisi baik	65%
13	Pelatihan Kotaku ✓	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Kotaku	190 orang
16	Dana BOP KOTAKU dan Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunal (PLBK) ✓	Jumlah dokumen laporan BOP KOTAKU dan penataan lingkungan pemukiman berbasis komunal (PLBK) yang terlaksana	1 dokumen

Program	Anggaran
1. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp 37.487.187.525,00
2. Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Rp 56.787.718.800,00
3. Program Pengendalian banjir	Rp 18.500.264.600,00
4. Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan	Rp 392.269.900,00

Makassar, Januari 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kota Makassar

Ir. M. Ansar, M.Si

Nip : 19630517 199203 1 004

Kabid. Pengelolaan Sumber Daya Air & Drainase

Moh. Syafar Madjid, ST

Nip: 19730314 199503 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. SYAFAR MAJID, ST

Jabatan : KASI PENGENDALIAN SUMBER DAYA AIR

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : MOH. SYAFAR MAJID, ST

Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Kedua,

MOH. SYAFAR MAJID, ST

Pihak Pertama,

MOH. SYAFAR MAJID, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inspeksi Kondisi Drainase	Jumlah dokumen kondisi drainase yang tersusun	1 dokumen
2.	Gerakan Bersih Saluran Drainase (GBSD)	Jumlah lokasi/kelurahan kegiatan GBSD Kota Makassar	10 lokasi
3.	Pemeliharaan Rutin Berkala Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran yang berfungsi optimal	70 km
4.	Normalisasi/Pengerukan Kanal Kota Makassar	Panjang kanal yang dinormalisasi/dikeruk dan diperbaiki	10 km
5.	Operasional Pengelolaan pintu air	Jumlah rumah pompa dan pintu air dalam keadaan baik dan berfungsi optimal	15 unit
6.	Dana BOP KOTAKU dan penataan lingkungan permukiman berbasis komunal (PLPBK)	Jumlah dokumen laporan BOP KOTAKU dan penataan lingkungan permukiman berbasis komunal yang tersusun	1 Dokumen
7.	Pelatihan Kotaku	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Kotaku	190 orang

Kegiatan	Anggaran
1. Inspeksi Kondisi Drainase	Rp 238.113.800,00
2. Gerakan Bersih Saluran Drainase (GBSD)	Rp 817.505.000,00
3. Pemeliharaan Rutin Berkala Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rp 20.540.213.800,00
4. Normalisasi/Pengerukan Kanal Kota Makassar	Rp 1.517.860.000,00
5. Operasional Pengelolaan pintu air	Rp 322.404.600,00
6. Pelatihan Kotaku	Rp 392.269.900,00
7. Dana BOP KOTAKU dan penataan lingkungan permukiman berbasis komunal (PLPBK)	Rp 1.176.838.000,00

Kabid. Pengelolaan Sumber Daya Air & Drainase


Moh. Syafar Majid, ST

Nip: 19730314 199503 1 003

Makassar, Januari 2019

Kasi Pemeliharaan SDA


Moh. Syafar Majid, ST

Nip: 19730314 199503 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. NINA WARDANI, ST

Jabatan : KASI PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : MOH. SYAFAR MADJID. ST

Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Kedua,


MOH. SYAFAR MADJID. ST

Pihak Pertama,


A. NINA WARDANI, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rehabilitasi saluran drainase /gorong-gorong	Panjang saluran sekunder dan tersier yang direhab	30 km
2.	Rehabilitasi sedang/Berat dermaga	Jumlah dermaga yang direhabilitasi	1 dermaga
3.	Rehabilitasi sedang/berat rumah pompa & pintu Air	Jumlah rumah pompa dan pintu air yang diperbaiki	4 unit

	Program		Anggaran
1.	Rehabilitasi saluran drainase /gorong-gorong	Rp	35.430.000.000,00
2.	Rehabilitasi sedang/Berat dermaga	Rp	870.000.000,00
3.	Rehabilitasi sedang/berat rumah pompa & pintu Air	Rp	690.000.000,00

Makassar, Januari 2019

Kabid. Pengelolaan Sumber Daya Air & Drainase



Moh. Syafar Madjid, ST

Nip: 19730314 199503 1 003

Kasi Pemeliharaan SDA



A. Nina Wardani, ST

Nip: 19770306 200212 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. KHAERUDDIN,ST, MM

Jabatan : KASI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : MOH. SYAFAR MADJID. ST

Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE


Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Kedua,


MOH. SYAFAR MADJID. ST

Pihak Pertama,


H. KHAERUDDIN,ST, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR


NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembangunan Drainase Perkotaan	Jumlah panjang drainase perkotaan yang terbangun	28 Km
2.	Pembangunan rumah pompa & pintu Air	Jumlah rumah pompa dan pintu air yang terbangun	2 unit
3.	Pembangunan tanggul dan talud	Panjang tanggul dan talud yang dibangun	350 meter
4.	Pembangunan Kolam Resapan dan Kolam Retensi	Pembangunan Kolam resapan dan kolam retensi	1 Aqua Pound dan 1 kolam retensi

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembangunan Drainase Perkotaan	Rp	37.249.073.725,00
2.	Pembangunan rumah pompa & pintu Air	Rp	2.700.000.000,00
3.	Pembangunan tanggul dan talud	Rp	2.800.000.000,00
4.	Pembangunan Kolam Resapan dan Kolam Retensi	Rp	9.600.000.000,00

Makassar, Januari 2019

Kabid. Pengelolaan Sumber Daya Air & Drainase

Kasi Pembangunan SDA



Moh. Syafar Madjid, ST

Nip: 19730314 199503 1 003



H. Khaeruddin, ST, MM

Nip: 19610121 199403 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSTATI HUSAIN, SE,MM

Jabatan : Plt. SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : IR. M. ANSAR, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Kedua,

IR. M. ANSAR, M.Si

Pihak Pertama,

ROSTATI HUSAIN, SE,MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program pelayanan administrasi perkantoran	Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran	100%
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	3 jenis
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang tersedia	3 orang
3	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya	Jumlah jasa pegawai honorer	276 org
4	Penyediaan bahan bacaan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	19 media cetak
5	Pengelolaan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga jasa administrasi aparatur kantor yang tersedia	49 orang
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	158 perjalanan
7	Pelaporan Data Potensi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pelaporan data potensi kepegawaian	3 dok
8	Pelaporan dan pengelolaan, penerimaan dan pengeluaran barang dan jasa kantor	Jumlah Pelaporan dan pengelolaan, penerimaan dan pengeluaran barang dan jasa yang tersedia	20 dokumen
9	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran yang tersedia	5 jenis
10	Sosialisasi Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Jasa Publikasi, dokumentasi dan iklan yang tersedia	18 media
11	Penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah Peg. Non PNS yang mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan	280 orang
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur	100%
12	Pengadaan alat-alat besar darat	Jumlah Pengadaan alat-alat besar darat yang tersedia	6 Unit
13	Pengadaan alat angkutan darat bermotor	Jumlah Pengadaan alat angkutan darat bermotor yang tersedia	7 unit
14	Pengadaan alat bengkel bermesin	Jumlah alat bengkel bermesin yang tersedia	50 Unit
15	Pengadaan alat keamanan dan perlindungan	Jumlah pengadaan alat keamanan dan perlindungan yang tersedia	3 Buah
16	Pengadaan alat ukur	Jumlah alat ukur yang tersedia	45 Unit
17	Pengadaan alat kantor	Jumlah alat kantor yang tersedia	20 Jenis
18	Pengadaan alat rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga yang tersedia	50 Jenis
19	Pengadaan komputer	Jumlah Komputer yang Tersedia	100 Unit
20	Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat	Jumlah pengadaan Meja,Kursi rapat Yang tersedia	62 Unit
21	Pengadaan alat studio	Jumlah pengadaan alat studio	30 Unit
22	Pengadaan alat komunikasi	Jumlah alat komunikasi yang tersedia	20 Unit
23	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga dalam kondisi baik	150 Unit
24	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah alat komputer dalam kondisi baik	110 Unit
25	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio	Jumlah alat studio dalam kondisi baik	4 unit

26	Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi	Jumlah alat komunikasi dalam kondisi baik	11 unit
27	Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi	Jumlah perizinan dan sertifikasi yang diadakan	355 dok
28	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	465 unit
29	Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)	Jumlah SIM yang terupdate	3 software
III	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas Pengawai	100%
30	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang tersedia	530 orang
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase capaian kinerja yang termuat dalam perjanjian kinerja perangkat daerah	100%
31	Penyusunan Laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun serta perhitungan penyusutan Aset OPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun serta asset yang tersedia	15 dok
32	Pengelolaan keuangan OPD	Jumlah laporan Pengelolaan keuangan OPD yang tersedia setiap tahunnya	25 dok
33	Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi	Jumlah dokumen Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi yang tersedia	1 dok
34	Publikasi perkembangan/kemajuan pembangunan	Jumlah Keg.publikasi perkembangan kemajuan pemb. Selama 1 tahun	36 media
35	Penyusunan RKA-OPD	Jumlah RKA yang tersedia dalam setahun	2 dok
36	Penyusunan DPA-OPD	Jumlah DPA yang tersedia dalam setahun	2 dok
37	Penyusunan RENJA-OPD	Jumlah Dokument RENJA OPD yang tersedia setahun	4 dok
38	Penyusunan LAKIP-OPD	Jumlah Dokument Lakip OPD yang tersedia	1 dok
39	Penyusunan Perjanjian kinerja-OPD	Jumlah dok. Perjanjian kinerja yang di susun	1 dok
40	Monitoring dan Evaluasi OPD	Jumlah dokumen hasil monev.pelaksanaan prog dan kegiatan pada sekretariat untuk 4 bidang dan 2 UPTD yang tersedia setiap bulan	12 dok
41	Penyusunan Realisasi fisik dan keuangan	Jumlah dokumen realisasi fisik dan keuangan yang tersedia	12 dok
42	Penyusunan dokumen DPU dalam angka	Jumlah dokumen DPU dalam angka yang tersedia	1 dok

Program

Anggaran

1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp	9.671.392.800,00
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp	13.855.153.400,00
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp	291.500.000,00
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	3.698.624.480,00

Makassar, Januari 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Pt. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum



Ir. M. ANSAR, M.Si

Nip : 19630517 199203 1 004



Hj. ROSTATI HUSAIN, SE, MM

Nip : 19680409 199603 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. ROSTATI HUSAIN, SE, MM

Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : HJ. ROSTATI HUSAIN, SE, MM

Jabatan : Plt. SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Kedua,

HJ. ROSTATI HUSAIN, SE, MM

Pihak Pertama,

HJ. ROSTATI HUSAIN, SE, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	3 jenis
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang tersedia	3 orang
3	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya	Jumlah jasa pegawai honorer	276 org
4	Penyediaan bahan bacaan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	19 media cetak
5	Pengelolaan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga jasa administrasi aparatur kantor yang tersedia	40 orang
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	158 perjalanan
7	Pelaporan Data Potensi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pelaporan data potensi kepegawaian	3 dok
8	Pelaporan dan pengelolaan, penerimaan dan pengeluaran barang dan jasa kantor	Jumlah Pelaporan dan pengelolaan, penerimaan dan pengeluaran barang dan jasa yang tersedia	20 dokumen
9	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran yang tersedia	5 jenis
10	Sosialisasi Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Jasa Publikasi, dokumentasi dan iklan yang tersedia	18 media
11	Penyedia jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah Peg. Non PNS yang mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan	280 orang
12	Pengadaan Alat-alat besar darat	Jumlah Pengadaan alat-alat besar darat yang tersedia	6 Unit
13	Pengadaan alat angkutan darat bermotor	Jumlah Pengadaan alat angkutan darat bermotor yang tersedia	7 unit
14	Pengadaan alat bengkel bermesin	Jumlah alat bengkel bermesin yang tersedia	50 Unit
15	Pengadaan alat ukur	Jumlah alat ukur yang tersedia	45 Unit
16	Pengadaan alat kantor	Jumlah alat kantor yang tersedia	20 Jenis
17	Pengadaan alat rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga yang tersedia	50 Jenis
18	Pengadaan komputer	Jumlah Komputer yang Tersedia	100 Unit
19	Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat	Jumlah pengadaan Meja,Kursi rapat Yang tersedia	62 Unit
20	Pengadaan alat studio	Jumlah pengadaan alat studio	26 Unit
21	Pengadaan alat komunikasi	Jumlah alat komunikasi yang tersedia	20 Unit
22	Pengadaan alat keamanan dan perlindungan	Jumlah pengadaan alat keamanan dan perlindungan yang tersedia	3 Buah
23	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga dalam kondisi baik	150 Unit
24	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah alat komputer dalam kondisi baik	110 Unit

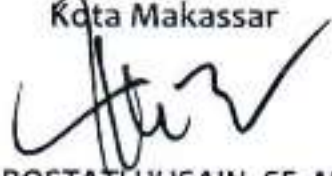
25	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio	Jumlah alat studio dalam kondisi baik	4 unit
26	Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi	Jumlah alat komunikasi dalam kondisi baik	11 unit
27	Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi	Jumlah perizinan dan sertifikasi yang diadakan	355 dok
28	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	465 Unit
29	Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)	Jumlah SIM yang terupdate	3 software
30	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang tersedia	530 orang
31	Penyusunan Laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun serta perhitungan penyusutan asset OPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun serta asset yang tersedia	15 dok
32	Pengelolaan keuangan OPD	Jumlah laporan Pengelolaan keuangan OPD yang tersedia setiap tahunnya	25 dok
33	Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi	Jumlah dokumen Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi yang tersedia	1 dok
34	Publikasi perkembangan/kemajuan pembangunan	Jumlah Keg.publikasi perkembangan kemajuan pemb. Selama 1 tahun	36 media

	Kegiatan		Anggaran
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp	1,416,000,000.00
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp	165,740,000.00
3	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya	Rp	3,540,000,000.00
4	Penyediaan bahan bacaan	Rp	72,450,000.00
5	Pengelolaan administrasi perkantoran	Rp	885,643,500.00
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp	960,000,000.00
7	Pelaporan Data Potensi Kependudukan	Rp	148,843,300.00
8	Pelaporan dan pengelolaan, penerimaan dan pengeluaran barang dan jasa kantor	Rp	186,322,000.00
9	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Rp	872,900,000.00
10	Sosialisasi Kinerja Pelayanan Publik	Rp	600,500,000.00
11	Penyedia jaminan sosial ketenagakerjaan	Rp	535,188,000.00
12	Pengadaan Alat-alat besar darat	Rp	7,243,708,200.00
13	Pengadaan alat angkutan darat bermotor	Rp	1,354,650,000.00
14	Pengadaan alat bengkel bermesin	Rp	1,198,787,000.00
15	Pengadaan alat ukur	Rp	373,000,000.00
16	Pengadaan alat kantor	Rp	123,000,000.00
17	Pengadaan alat rumah tangga	Rp	352,450,000.00
18	Pengadaan komputer	Rp	1,183,958,200.00
19	Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat	Rp	267,000,000.00
20	Pengadaan alat studio	Rp	481,200,000.00
21	Pengadaan alat komunikasi	Rp	152,000,000.00
22	Pengadaan alat transportasi dan perlengkapan	Rp	1,100,000,000.00

23	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga	Rp	210,000,000.00
24	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Rp	198,000,000.00
25	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio	Rp	48,000,000.00
26	Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi	Rp	10,000,000.00
27	Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi	Rp	462,500,000.00
28	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp	74,300,000.00
29	Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)	Rp	90,000,000.00
30	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp	291,500,000.00
31	Penyusunan Laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun serta perhitungan penyusutan asset GUD	Rp	37,499,700.00
32	Pengelolaan keuangan OPD	Rp	1,509,200,000.00
33	Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi	Rp	116,400,000.00
34	Publikasi perkembangan/kemajuan pembangunan	Rp	1,110,500,000.00

Plt. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum

Kota Makassar



Hi. ROSTATI HUSAIN, SE, MM

Nip : 19680409 199603 2 002

Makassar, Januari 2019

Kasubag. Umum & Kepegawaian



Hi. ROSTATI HUSAIN, SE, MM

Nip : 19680409 199603 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EMON DAIHATSU JABBAR, SE M.Hum

Jabatan : KASUBAG KEUANGAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : HJ. ROSTATI HUSAIN, SE, MM

Jabatan : Plt. SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Kedua,

HJ. ROSTATI HUSAIN, SE, MM

Pihak Pertama,

EMON DAIHATSU JABBAR, SE M.Hum



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELISYAMDJAYA, SE

Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : HJ. ROSTATI HUSAIN, SE, MM

Jabatan : Plt. SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

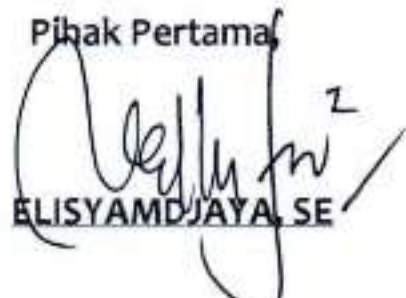
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Kedua,


HJ. ROSTATI HUSAIN, SE, MM

Pihak Pertama,


ELISYAMDJAYA, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan dokumen DPU dalam angka	Jumlah Dokumen DPU dalam angka yang tersusun	1 Dokumen
2	Penyusunan RKA-OPD	Jumlah RKA yang tersedia dalam setahun	2 dok
3	Penyusunan DPA-OPD	Jumlah DPA yang tersedia dalam setahun	2 dok
4	Penyusunan RENJA-OPD	Jumlah Dokument RENJA OPD yang tersedia setahun	4 dok
5	Penyusunan LAKIP-OPD	Jumlah Dokument Lakip OPD yang tersedia	1 dok
6	Penyusunan Perjanjian kinerja-OPD	Jumlah dok. Perjanjian kinerja yang di susun	1 dok
7	Monitoring dan Evaluasi OPD	Jumlah dokumen hasil monev.pelaksanaan prog dan kegiatan pada sekretariat untuk 4 bidang dan 2 UPTD yang tersedia setiap bulan	12 dok
8	Penyusunan Realisasi fisik dan keuangan	Jumlah dokumen realisasi fisik dan keuangan yang tersedia	12 dok

Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan RKA-SKPD	Rp 84,290,000.00
2. Penyusunan DPA-SKPD	Rp 74,550,000.00
3. Penyusunan RENJA-SKPD	Rp 75,000,000.00
4. Penyusunan LAKIP-SKPD	Rp 40,000,000.00
5. Penyusunan Perjanjian Kinerja-SKPD	Rp 14,949,380.00
6. Monitoring dan Evaluasi SKPD	Rp 324,307,800.00
7. Penyusunan realisasi fisik dan keuangan	Rp 283,540,000.00
8. Penyusunan dokumen DPU dalam angka	Rp 20,387,600.00

Makassar, 03 Januari 2019

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum

Kota Makassar


Hj. ROSTATI HUSAIN, SE, MM

Nip : 19680409 199603 2 002

Kasubag. Program dan Pelaporan


ELISYAMDJAYA, SE

Nip : 19740413 199402 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KERLINUS BUMBUNGAN, ST

Jabatan : KEPALA UPTD. PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : IR. M. ANSAR, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Kedua,

IR. M. ANSAR, M.Si

Pihak Pertama,

KERLINUS BUMBUNGAN, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	Cakupan mutu pelayanan sistem air limbah domestik	45%
1	Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah On Site Sistem	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi	480 orang
2	Sosialisasi Pembinaan Peyedotan tangki septik individual	Jumlah kepala keluarga yang dilakukan pembinaan	660 orang
3	Sosialisasi Penguatan Kelembagaan IPAL Komunal	Jumlah badan pengelola IPAL komunal bermasalah dapat diberdayakan aktif dan mandiri	28 kelembagaan
4	Penyusunan Data Base Pengelolaan Air Limbah	Jumlah laporan data base pengelolaan air limbah	12 Laporan
5	Pendataan Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (P-SLLT)	Jumlah laporan pendataan layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT)	12 laporan
6	Penyusunan revisi SOP UPTD PAL	Jumlah SOP UPTD PL yang direvisi	6 dokumen
7	Lomba pengelolaan Air Limbah di tingkat Masyarakat	Jumlah pemenang lomba pengelolaan air limbah ditingkat masyarakat	6 pemenang
8	Penyusunan Regulasi Pengelolaan Air Limbah	Jumlah dokumen regulasi jasa penyedotan tinja	2 dokumen
9	Sosialisasi Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta sosialisasi perda pengelolaan air limbah domestik Kota Makassar	600 orang
10	Pelatihan Pengelolaan UPTD PAL	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pelatihan pengelolaan UPTD PAL	100 orang
11	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan IPTL	Terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan IPTL dalam kondisi baik	12 laporan
12	Inspeksi Kondisi Sarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah	131 lokasi
13	Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah Domestik IPAL Komunal	Jumlah instalasi pengelolaan air limbah (IPAL komunal) dalam kondisi baik	66 lokasi
14	Pengujian Berkala Effluent IPAL Komunal, IPAL Kawasan dan IPLT	Jumlah titik pengujian hasil effluent secara berkala dan komprehensif	60 titik
15	Peningkatan fasilitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Nipa-nipa	Jumlah fasilitas instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT) nipa-nipa yang ditingkatkan	1 unit

Program

Anggaran

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

Rp

4.694.187.500,00

Makassar, Januari 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah

Kota Makassar



Ir. M. Ansar, M.Si

Nip : 19630517 199203 1 004



Kerlinus B, ST

Nip : 19670226 200604 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKBAR ASRI, ST

Jabatan : KTU UPTD. PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : KERLINUS B, ST

Jabatan : KEPALA UPTD. PENGELOLAAN AIR LIMBAH


Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Kedua,


KERLINUS B, ST

Pihak Pertama,


AKBAR ASRI, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah On Site Sistem	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1440 orang
2.	Sosialisasi Pembinaan Peyedotan tangki septik individual	Jumlah kepala keluarga yang dilakukan pembinaan	560 KK
3.	Sosialisasi Penguatan Kelembagaan IPAL Komunal	Jumlah badan pengelola IPAL komunal bermasalah dapat diberdayakan aktif dan mandiri	28 kelembagaan
4.	Penyusunan Data Base Pengelolaan Air Limbah	Jumlah laporan data base pengelolaan air limbah	12 Laporan
5.	Pendataan Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (P-SLLT)	Jumlah laporan pendataan layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT)	12 laporan
6.	Penyusunan dan revisi SOP UPTD PAL	Jumlah SOP UPTD PL yang direvisi	6 dokumen
7.	Lomba pengelolaan Air Limbah di tingkat Masyarakat	Jumlah pemenang lomba pengelolaan air limbah ditingkat masyarakat	6 pemenang
8.	Penyusunan Regulasi Pengelolaan Air Limbah	Jumlah dokumen regulasi jasa penyedotan tinja	3 dokumen
9.	Sosialisasi Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta sosialisasi perda pengelolaan air limbah domestik Kota Makassar	600 orang
10.	Pelatihan Pengelolaan UPTD PAL	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pelatihan an pengelolaan UPTD PAL	400 orang
11.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan IPTL	Terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan IPTL dalam kondisi baik	12 laporan
12.	Inspeksi Kondisi Sarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah	62 lokasi
13.	Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah Domestik IPAL Komunal	Jumlah instalasi pengelolaan air limbah (IPAL komunal) dalam kondisi baik	65 lokasi
14.	Pengujian Berkala Effluent IPAL Komunal, IPAL Kawasan dan IPLT	Jumlah titik pengujian hasil effluent secara berkala dan komprehensif	50 titik
15.	Peningkatan fasilitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Nipa-nipa	Jumlah fasilitas instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT) nipa-nipa yang ditingkatkan	1 unit

	Kegiatan	Anggaran
1.	Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah On Site Sistem (IPAL Komunal)	Rp 260.083.000,00
2.	Sosialisasi Pembinaan Peyedotan tangki septik individual	Rp 298.785.000,00
3.	Sosialisasi Penguatan Kelembagaan IPAL Komunal	Rp 259.704.000,00
4.	Penyusunan Data Base Pengelolaan Air Limbah	Rp 213.524.000,00
5.	Pendataan Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (P-SLLT)	Rp 277.059.500,00
6.	Penyusunan dan Revisi SOP UPTD PAL	Rp 57.526.000,00
7.	Lomba pengelolaan Air Limbah di tingkat Masyarakat	Rp 254.899.000,00
8.	Penyusunan Regulasi Pengelolaan Air Limbah	Rp 479.162.000,00
9.	Sosialisasi Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rp 299.888.000,00

10.	Pelatihan Pengelolaan UPTD PAL	Rp	59.731.000,00
11.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan IPTL	Rp	733.543.000,00
12.	Inspeksi Kondisi Sarana Pengelolaan Air Limbah	Rp	255.168.000,00
13.	Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah Domestik IPAL Komunal	Rp	620.900.000,00
14.	Pengujian Berkala Effluent IPAL Komunal, IPAL Kawasan dan IPLT	Rp	154.001.000,00
15.	Peningkatan fasilitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Nipa-nipa	Rp	470.214.000,00

Makassar, Januari 2019

Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah

KTU UPTD Pengelolaan Air Limbah


Kerlinus, B, ST

N i p : 19670226 200604 1 011


Akbar Asri, ST

N i p : 19740318 200604 1 0041



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD JUSRI, ST,MM

Jabatan : KEPALA UPTD. PENERANGAN JALAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : IR. M. ANSAR, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Kedua,

IR. M. ANSAR, M.Si

Pihak Pertama,

ACHMAD JUSRI, ST,MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program pengadaan lampu jalan	Cakupan ketersediaan lampu jalan	88%
1	Pengadaan Lampu Jalan	Jumlah pengadaan lampu jalan	800 titik
2	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Penerangan pada Lorong-Lorong	Jumlah titik lampu jalan baru pada lorong-lorong yang terpasang	3366 titik
3	Updating Data Base Lampu Jalan di Kota Makassar	Jumlah laporan updating data base lampu jalan yang tersedia	1 dokumen
4	Penerapan Smart PJU	Jumlah titik yang terpasang smart PJU	200 titik
II	Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan	Presentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik	90%
5	Langganan Penerangan Lampu Jalan	Jumlah KWH penerangan jalan umum (BPJU) yang terbayarkan	1557 KWH
6	Rehabilitasi Penerangan Lampu Jalan	Jumlah lampu jalan kota yang terpelihara	25.000 titik
7	Pengawasan/Pegecekan Meteran Langganan Listrik	Jumlah pengecekan meteran langganan listrik	17208 KWH
8	Pendataan dan Pengawasan Penyedia Tenaga Listrik	Jumlah data penyediaan tenaga listrik	
9	Penggantian Lampu Jalan Konvensional dengan LED	Jumlah penggantian lampu jalan konvensional ke LED yang tersedia	500 titik
10	Penanganan B3 Lampu Mercury	Jumlah limba B3 lampu mercury yang ditangani	1000 kg
11	Sosialisasi Penerangan Jalan dan Taman	Jumlah peserta sosialisasi penerangan jalan dan taman	150 orang
12	Normalisasi Panel dan Jaringan PJU	Jumlah unit PJU yang dinormalisasi	1557 unit
13	Inspeksi Penerangan Jalan	Jumlah dokumen pemantauan lampu jalan	4 dokumen

Program	Anggaran
1. Program pengadaan lampu jalan	Rp 45.589.750.000,00
2. Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan	Rp 87.238.522.200,00

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Makassar



Ir. M. Ansar, M.Si

Nip : 19630517 199203 1 004

Makassar, Januari 2019

Kepala UPTD Lampu Jalan



H. Achmad Jusri, ST, MM

Nip : 19651231 198903 1 172



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAJRAH, ST

Jabatan : KTU UPTD. PENERANGAN JALAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : H. ACHMAD JUSRI, ST, MM

Jabatan : KEPALA UPTD. PENERANGAN JALAN

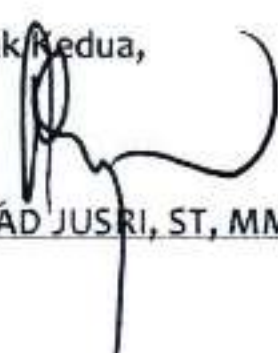
Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Kedua,


H. ACHMAD JUSRI, ST, MM

Pihak Pertama,


HAJRAH, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengadaan Lampu Jalan	Jumlah pengadaan lampu jalan	800 titik
2.	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Penerangan pada Lorong-Lorong	Jumlah titik lampu jalan baru pada lorong-lorong yang terpasang	3366 titik
3.	Updating Data Base Lampu Jalan di Kota Makassar	Jumlah laporan updating data base lampu jalan yang tersedia	1 dokumen
4.	Penerapan Smart PJU	Jumlah titik yang terpasang smart PJU	200 titik
5.	Langganan Penerangan Lampu Jalan	Jumlah KWH penerangan jalan umum (BPJU) yang terbayarkan	1557 KWH
6.	Rehabilitasi Penerangan Lampu Jalan	Jumlah lampu jalan kota yang terpelihara	25.000 titik
7.	Pengawasan/Pengecekan Meteran Langganan Listrik	Jumlah pengecekan meteran langganan listrik	17208 KWH
8.	Pendataan dan Pengawasan Penyedia Tenaga Listrik	Jumlah data penyediaan tenaga listrik	
9.	Penggantian Lampu Jalan Konvensional dengan LED	Jumlah penggantian lampu jalan konvensional ke LED yang tersedia	500 titik
10.	Penanganan B3 Lampu Mercury	Jumlah limba B3 lampu mercury yang ditangani	1000 kg
11.	Sosialisasi Penerangan Jalan dan Taman	Jumlah peserta sosialisasi penerangan jalan dan taman	150 orang
12.	Normalisasi Panel dan Jaringan PJU	Jumlah unit PJU yang dinormalisasi	1557 unit
13.	Inspeksi Penerangan Jalan	Jumlah dokumen pemantauan lampu jalan	4 dokumen

Kegiatan	Anggaran
1. Pengadaan Lampu Jalan	Rp 7.705.000.000,00
2. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Penerangan pada Lorong-Lorong	Rp 35.134.750.000,00
3. Updating Data Base Lampu Jalan di Kota Makassar	Rp 250.000.000,00
4. Penerapan Smart PJU	Rp 2.500.000.000,00
5. Langganan Penerangan Lampu Jalan	Rp 52.736.800.000,00
6. Rehabilitasi Penerangan Lampu Jalan	Rp 17.864.342.000,00
7. Pengawasan/Pengecekan Meteran Langganan Listrik	Rp 378.974.000,00
8. Pendataan dan Pengawasan Penyedia Tenaga Listrik	Rp 244.174.200,00
9. Penggantian Lampu Jalan Konvensional dengan LED	Rp 13.000.000.000,00
10. Penanganan B3 Lampu Mercury	Rp 415.000.000,00
11. Sosialisasi Penerangan Jalan dan Taman	Rp 299.236.000,00
12. Normalisasi Panel dan Jaringan PJU	Rp 1.999.996.000,00
13. Inspeksi Penerangan Jalan	Rp 300.000.000,00

Makassar, Januari 2019

Kepala UPTD Lampu Jalan

H.Achmad Jusri, ST, MM

Nip : 196512311989031172

KTU UPTD Lampu Jalan

Hajrah, ST

Nip : 197410142008012008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIFUDDIN SYHRIF, SE,MM

Jabatan : KEPALA UPTD. PERBENGKELAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : IR. M. ANSAR, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

Pihak Kedua,

IR. M. ANSAR, M.Si

Pihak Pertama,

ARIFUDDIN SYHRIF, SE,MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Cakupan peralatan alat-alat berat dalam kondisi baik	88%
1	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara	42 unit
2	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel	Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel yang dipelihara	463 unit
3	Pengelolaan UPTD Perbengkelan Ke PU-an	Jumlah alat bengkel yang dikelola	12 Jenis
4	Pemantauan Alat Berat Perbengkelan	Jumlah alat berat perbengkelan yang dipantau	42 unit
5	Pengelolaan dan Peralatan K3 UPTD Perbengkelan	Jumlah peralatan K3 UPTD perbengkelan yang dikelola	85 orang
II	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%
6	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	Jumlah alat bengkel tak bermesin yang tersedia	12 jenis
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 unit
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Angkutan Darat Bermotor	Jumlah alat angkutan darat bermotor dalam kondisi baik	463 unit
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten di bidangnya	100%
9	Pelatihan Mekanik UPTD Perbengkelan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan mekanik UPTD perbengkelan	70 orang

Program	Anggaran
1. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Rp 4.999.780.600,00
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Rp 12.499.210.000,00
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 215.099.000,00

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Makassar



Ir. M. Ansar, M.Si

N i p : 19630517 199203 1 004

Makassar, Januari 2019
Kepala UPTD Bengkel Metro



Arifuddin Syahrif, SE, MM

N i p : 19700310 199303 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAMKA DARWIS, SH, MM

Jabatan : KTU UPTD. PERBENGKELAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : ARIFUDDIN SYHRIF, SE, MM


Jabatan : KEPALA UPTD. PERBENGKELAN

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


ARIFUDDIN SYHRIF, SE, MM

Makassar, Januari 2019

Pihak Pertama,

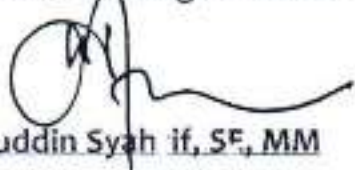

HAMKA DARWIS, SH, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara	45 unit
2.	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel	Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel yang dipelihara	463 unit
3.	Pengelolaan UPTD Perbengkelan Ke PU-an	Jumlah alat bengkel yang dikelola	12 Jenis
4.	Pemantauan Alat Berat Perbengkelan	Jumlah alat berat perbengkelan yang dipantau	42 unit
5.	Pengelolaan dan Peralatan K3 UPTD Perbengkelan	Jumlah peralatan K3 UPTD perbengkelan yang dikelola	85 orang
6.	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	Jumlah alat bengkel tak bermesin yang tersedia	12 jenis
7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 unit
8.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Angkutan Darat Bermotor	Jumlah alat angkutan darat bermotor dalam kondisi baik	463 unit
9.	Pelatihan Mekanik UPTD Perbengkelan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan mekanik UPTD perbengkelan	70 orang

Program	Anggaran
1. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Rp 2.704.725.000,00
2. Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel	Rp 1.391.113.000,00
3. Pengelolaan UPTD Perbengkelan Ke PU-an	Rp 352.017.600,00
4. Pemantauan Alat Berat Perbengkelan	Rp 266.475.000,00
5. Pengelolaan dan Peralatan K3 UPTD Perbengkelan	Rp 285.450.000,00
6. Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp 350.000.000
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Rp 40.000.000
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 12.109.210.000
9. Pelatihan Mekanik UPTD Perbengkelan	Rp 215.099.000

Kepala UPTD Bengkel Metro



Arifuddin Syah, S¹, MM

N i p : 19700310 199303 1 010

Makassar, Januari 2019

KTU UPTD Bengkel Metro



Hamka Darwis Sulaeman, SH, MM

N i p : 19760423 201001 1 013

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Indikator Kinerja

Setiap program dan kegiatan dalam RENSTRA kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (*outcome*), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator kinerja utama Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar dalam perencanaan dan akuntabilitas keuangan daerah.

Indikator kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penentuan indikator Kinerja setiap program/ kegiatan dikomunikasikan pada setiap Bidang, UPTD dan Sekretariat dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mencapai target kinerja dan untuk memperbaiki kinerja.

**LAMPIRAN II : RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

DINAS PEKERJAAN UMUM

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN(OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pelayanan Publik yang cepat dan berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	Jenis	3 Jenis
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya	Jumlah jasa Pegawai Honorer	Orang	276 Orang
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang tersedia	Orang	3 Orang
	Penyediaan bahan bacaan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Media Cetak	19 Media Cetak
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Perjalanan	158 Perjalanan
	Pelaporan Data Potensi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pelaporan data potensi kepegawaian	dok	3 dok
	Pengelolaan administrasi perkantoran	Jumlah Tenaga Jasa Administrasi Aparatur Kantor yang tersedia	Orang	49 Orang
	Sosialisasi Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Jasa Publikasi, Dokumentasikan Iklan yang tersedia	Media	18 Media
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran yang tersedia	Jenis	5 Jenis
	Pelaporan dan Pengelolaan, Penerimaan dan Pengeluaran Barang dan Jasa Kantor	Jumlah Pelaporan dan Pengelolaan, Penerimaan dan Pengeluaran Barang dan Jasa yang tersedia	Dokumen	20 Dokumen
	Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	280 Orang
Terwujudnya Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten di bidangnya		100 %
	Pelatihan Mekanik UPTD Perbengkelan	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Mekanik UPTD Perbengkelan	Orang	70 Orang
	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengawasan ke - PU an	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis perencanaan dan pengawasan ke- PU-an	Orang	50 Orang
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ke PU an	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ke - PU-an	orang	175 orang

Terwujudnya Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas Pegawai		100%
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya yang tersedia	Orang	530 Orang
Terwujudnya Pelayanan Publik yang cepat dan berkualitas	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%
	Pengadaan alat-alat besar darat	Jumlah Pengadaan alat-alat besar darat yang tersedia	Unit	6 Unit
	Pengadaan alat angkutan darat bermotor	Jumlah Pengadaan alat angkutan darat bermotor yang tersedia	Unit	7 Unit
	Pengadaan alat bengkel bermesin	Jumlah alat bengkel bermesin yang tersedia	unit	50 unit
	Pengadaan alat bengkel tak bermesin	Jumlah alat bengkel tak bermesin yang tersedia	Jenis	12 Jenis
	Pengadaan alat ukur	Jumlah alat ukur yang tersedia	Unit	45 Unit
	Pengadaan alat kantor	Jumlah alat kantor yang tersedia	Jenis	20 Jenis
	Pengadaan alat rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga yang tersedia	Unit	50 Unit
	Pengadaan komputer	Jumlah komputer yang tersedia	Unit	100 Unit
	Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat	Jumlah Pengadaan meja kusi kerja rapat yang tersedia	Unit	62 Unit
	Pengadaan alat studio	Jumlah Pengadaan alat studio	Unit	26 Unit
	Pengadaan alat komunikasi	Jumlah alat komunikasi yang tersedia	Unit	20 Unit
	Pengadaan alat keamanan dan perlindungan	Jumlah Pengadaan alat keamanan dan perlindungan yang tersedia	buah	3 Buah
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Unit	1 Unit
	Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor	Jumlah alat angkutan darat bermotor dalam kondisi baik	Unit	463 Unit
	Pemeliharaan rutin/berkala alat Rumah tangga	Jumlah alat Rumah tangga dalam kondisi baik	Unit	150 Unit
	Pemeliharaan rutin/berkala alat komputer	Jumlah alat komputer dalam kondisi baik	Unit	110 Unit
	Pemeliharaan alat studio	Jumlah alat studio dalam kondisi baik	Unit	4 Unit
	Pemeliharaan alat komunikasi	Jumlah alat komunikasi dalam kondisi baik	Unit	11 Unit
	Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi	Jumlah perizinan dan sertifikasi yang diadakan	Dok	355 Dok
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen Innstalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Unit	465 Unit
Pemeliharaan Rutin/berkala				

Terwujudnya Pelayanan Publik yang cepat dan berkualitas	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% capaian Kinerja yang termuat dalam Perj: njian Kinerja Perangkat Daerah		100%
	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP-OPD yang tersedia	Dokumen	1 Dokumen
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun serta Perhitungan Penyusutan Asset SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun serta asset yang tersedia	Dokumen	15 Dokumen
	Penyusunan Dokumen penetapan Kinerja kota Makassar	laporan dokumen penetapan Kinerja sebanyak 15 eksemplar tiap tahunnya	Dokumen	1 Dokumen
	Pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah laporan pengelolaan keuangan-OPD yang tersedia setiap tahunnya	Dokumen	25 Dokumen
	Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi yang tersedia	Dokumen	1 Dokumen
	Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersedia dalam setahun	Dokumen	2 Dokumen
	Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang tersedia dalam setahun	Dokumen	2 Dokumen
	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja-OPD yang tersedia	Dokumen	1 Dokumen
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Hasil Monev. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada sekretariat untuk 4 bidang dan 2 upkd yang tersedia tiap bulan	Dokumen	12 Dokumen
	Penyusunan realisasi fisik keuangan	Jumlah Dokumen realisasi fisik dan keuangan yang tersedia	Dokumen	12 Dokumen
	Publikasi perkembangan/kemajuan pembangunan	Jumah kegiatan publikasi perkembangan kemajuan pembangunan selama setahun	Media	36 Media
	Penyusunan Buku DPU dalam angka	Jumlah Dokumen DPU dalam angka yang tersusun	Dokumen	1 Dokumen
	Penyusunan standar harga satuan ke PU-an	Jumlah Dokumen sebagai acuan dalam Penyusunan harga bahan ke PU an	Dokumen	4 Dokumen
Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan	Program pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah panjang jalan yang dibangun	Km	2,6 Km
		Jumlah jembatan yang dibangun	buah	7 buah
	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	buah	7 buah
	Pembangunan Jalan (Hibah kepada Masyarakat / Pihak Ke tiga)	ruas Jalan yang terbangun untuk di Hibahkan (Yang tidak termasuk Aset Pemkot)	Ruas	1 Ruas
Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan	Program pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang Jalan yang diperbaiki	Km	25 Km
		Panjang Jembatan yang diperbaiki	Buah	7 Buah
	Pembangunan trotoar	Panjang Trotoar Yang Di Bangun	Km	4 KM

	Pemeliharaan Jalan Kota	Jumlah Ruas Jalan Kota Yang Terpelihara	Ruas	100 Ruas
	Inspeksi Jalan Kota	Jumlah Dokumen Hasil Inspeksi Jalan Kota	Dokumen	14 Dokumen
	Sarana dan Prasarana Jalan (DAK)	Jumlah Ruas Jalan Yang ditingkatkan Menggunakan Sumber Dana DAK	Ruas	3 Ruas
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar	Jumlah Ruas Jalan Yang Memiliki Trotoar Dalam Kondisi Baik	Ruas	2 Ruas
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan APBD II	Jumlah Ruas Jalan Yang ditingkatkan Menggunakan Sumber Dana APBD	Ruas	108 Ruas
	Penataan Simpang Jalan	Jumlah Titik Simpang Jalan yang ditingkatkan	Titik	4 Titik
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Median Jalan	Jumlah Ruas Jalan Yang Memiliki Med'an Jalan dalam Kondisi Baik	Ruas	5 Ruas
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan	Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik	Buah	7 Buah
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan prasarana Jalan (DID)	Jumlah ruas jalan yang direhab/dipelihara menggunakan sumber dana DID	Ruas	3 Ruas
Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan	Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan (Jalan Lingkungan)	Cakupan ketersediaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan)		80%
		Cakupan Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik		70%
	Pembangunan Jalan Lingkungan Kota	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan yang ditingkatkan	Ruas	200 Ruas
	Pemeliharaan jalan lingkungan	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	Ruas	100 Ruas
	Pelatihan KOTAKU	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan KOTAKU	orang	190 Orang
	Pembangunan Infrastruktur Lorong	Jumlah Jalan Lingkungan yang memiliki Penutup Saluran	Ruas	153 Ruas
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana gedung pemerintah	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah bangunan pemerintah yang terbangun		19 unit
		Jumlah bangunan pemerintah yang direhabilitasi		23 unit
	Pembangunan Gedung Pemerintah	Jumlah Gedung Pemerintah yang dibangun	unit	19 unit
	Pembangunan Gedung Pemerintah (Hibah)	Jumlah Gedung Pemerintah yang dibangun (Hibah)	unit	1 unit
	Rehabilitasi / pemeliharaan sedang/berat bangunan milik Pemerintah	Jumlah bangunan milik pemerintah yang direhabilitasi	unit	23 unit
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung tempat kerja	Jumlah pemeliharaan dan perbaikan gedung tempat kerja setiap tahun	Unit	1 Unit
	Pemantauan bangunan gedung Pemerintah	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang dipantau	Unit	15 Unit
	Taksasi bangunan gedung/rumah sarana dan prasarana umum	Bangunan gedung/rumah sarana dan prasarana umum yang ditaksasi	unit	25 unit
	Rehabilitasi sedang/berat gedung / fasilitas pemerintah (hibah kepada masyarakat/pihak ketiga)	Jumlah gedung yang direhabilitasi	unit	1 unit
	Rehabilitasi sedang/berat Prasarana Pemerintah	Jumlah Prasarana Pemerintah yang di Rehabilitasi	unit	1 unit

	Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Prasarana dan bangunan pemerintah	Jumlah aplikasi Sistem Penyimpanan Data dan Informasi bidang prasarana dan bangunan pemerintah	Aplikasi (pengembangan)	1 Aplikasi (pengembangan)
	Penataan Kaki Lima Kota Makassar	Jumlah lokasi tempat berjualan penataan kaki lima yang tertata di Kota Makassar	Lokasi	1 Lokasi
	Penataan Anjungan Pantai Losari	Jumlah Lokasi Anjungan Pantai Losari tertata	Lokasi	4 Lokasi
	Pembangunan Gedung Pemerintah (DID)	Jumlah Gedung Pemerintah yang dibangun (DID)	Unit	5 Unit
Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih	Jumlah titik sarana prasarana air bersih yang terbangun		8 Titik
		Jumlah Rumah Tangga kumuh/miskin yang terjangkau air bersih		1377 SR
	Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih	Jumlah sarana & prasarana air bersih yang terbangun	unit	5 unit
	Sosialisasi Sarana & Prasarana Air Bersih	Jumlah Peserta sosialisasi sarana dan prasarana air bersih	orang	400 orang
	Pemeliharaan sarana dan prasarana Air Bersih	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dipelihara	unit	5 unit
	Lomba Pengelolaan Air Bersih di Tingkat Masyarakat	Jumlah pemenang lomba pengelolaan Air Bersih tingkat masyarakat	Pemenang	6 Pemenang
	Pelatihan pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Jumlah Peserta Pelatihan Sarana dan Prasarana Air Bersih	orang	200 orang
	Penguatan kelembagaan Badan Pengelolaan Air Bersih	Jumlah Badan Pengelola Air Bersih bermasalah dapat diberdayakan aktif dan mandiri	kelembagaan	10 kelembagaan
	Pembangunan sarana dan prasarana penugasan air bersih (DAK)	Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana air bersih (DAK)	titik	4 titik
Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman	Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah	Cakupan mutu pelayanan sistem air limbah domestik		60%
	Workshop Pokjasan Kelompok Kerja Sanitasi masyarakat	Jumlah peserta workshop pokjasan Sanitasi Masyarakat	orang	200 orang
	Workshop Pengelolaan & Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah peserta yang mengikuti workshop pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi	orang	200 orang
	Sosialisasi Sewerage System Perkotaan	Jumlah peserta sosialisasi sewerage sistem perkotaan	orang	200 orang
	Sosialisasi IPAL Kawasan/Komunal	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi IPAL kawasan/komunal	orang	300 orang
	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (DAK)	Jumlah titik Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (DAK)	titik	2 titik
	Sarana dan prasarana sanitasi (DAK penugasan)	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana sanitasi (DAK penugasan)	lokasi	5 lokasi
	Pembangunan Jaringan IPAL Sambungan Rumah	Jaringan IPAL Sambungan Rumah yang terbangun	SR	120 SR

	Pembangunan IPAL Kantor Pemerintahan	Jumlah IPAL kantor pemerintahan yang terbangun	unit	2 unit
	Inspeksi sarana prasarana sanitasi dan air bersih	Lokasi pelaksanaan inspeksi sarana prasarana sanitasi dan air bersih	kec.	6 kec.
	Pembangunan IPAL Losari	Jumlah Lokasi pekerjaan pembangunan IPAL losari	Lokasi	1 Lokasi
Meningkatnya kualitas drainase permukiman perkotaan	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah titik genangan yang dikurangi tinggi, luas dan lama genangan		5 titik genangan dikurangi
		Jumlah Panjang Box Culvert yang terpasang		15 Km
	Inspeksi Kondisi Drainase	Jumlah dokumen Kondisi Drainase yang tersusun	Dokumen	1 Dokumen
	Pembangunan Drainase Perkotaan	Jumlah Panjang Drainase Perkotaan yang terbangun	KM	28 KM
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran Drainase/gorong-gorong	50 % Panjang salurean yang berfungsi dengan baik dari total panjang saluran (3.234 Km)			10 %
	Rehabilitasi saluran Drainase/gorong-gorong	Panjang saluan sekunder dan tersier yang direhab	km	30 km
	Gerakan Bersih Saluran Drainase (GBSD)	Jumah lokasi/kelurahan kegiatan GBSD kota Makassar	lokasi	10 lokasi
	Pemeliharaan Rutin Berkala Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran yang berfungsi optimal	km	70 km
Program pengendalian banjir	24 Rumah Pompa dan Pintu Air			2 unit Bangunan
	Panjang kanal yang di normalisasi/dikeruk dan diperbaiki			10 km
	Normalisasi / Pengerukan Kanal Kota Makassar	Panjang kanal yang di normalisasi/dikeruk dan diperbaiki	km	10 km
	Pembangunan Rumah Pompa & Pintu Air	Jumlah Rumah Pompa dan Pintu Air yang terbangun	unit	2 unit
	Operasional Pengelolaan Pintu Air	Jumlah Rumah Pompa dan Pintu Air dalam keadaan baik dan berfungsi optimal	unit	15 unit
	Rehabilitasi Sedang / Berat Dermaga	Jumlah Dermaga yang direhabilitasi	dermaga	1 dermaga
	Pembangunan Tanggul dan Talaud	Panjang tanggul dan talud yang dibangun	meter	350 meter
	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Pompa dan Pintu Air	Jumlah Rumah Pompa dan Pintu Air yang diperbaiki	unit	4 unit
	Pembangunan Kolam Resapan dan Kolam Retensi	Jumlah Kolam Resapan yang dibangun	Aqua Pound dan Kolam Retensi	5 Aqua Pound dan 1 Kolam Retensi

Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan teknis dan layanan IUJK	Program Bina Teknis	% Dokumen Perencanaan Teknis yang dilaksanakan		100%
		% titik pengawasan teknis yang terlaksana		100%
		% Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi		100%
Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Air dan Drainase	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Air dan Drainase	Jumlah Dokumen perencanaan teknis pembangunan Bangunan Air dan Drainase yang tersedia	Dokumen	11 Dokumen
	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen perencanaan teknis pembangunan Jalan dan Jembatan yang tersedia	Dokumen	26 Dokumen
	Perencanaan Teknis Pembangunan UPTD	Jumlah Dokumen perencanaan teknis dalam pembangunan yang dilakukan UPTD	dokumen	7 dokumen
	Pengukuran dan Pematokan Jalan	Jumlah Laporan Hasil pengukuran dan pematokan jalan	Dokumen	1 Dokumen
	Review Desain Gedung Pemerintah mengacu Konsep Green Building	jumlah dokumen hasil review desain gedung pemerintah yang telah mengacu pada konsep green building	Dokumen	1 Dokumen
	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Pemerintah	Jumlah Dokumen perencanaan teknis pembangunan Gedung Pemerintah yang terpenuhi	Dokumen	32 Dokumen
	Penyusunan Dokumen Lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan yang tersusun	Dokumen	6 Dokumen
	Penyusunan Leger Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen Leger dan Jembatan yang tersusun	Dokumen	1 Dokumen
	Review dan Penyerasian Hasil Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Masyarakat yang terakomodir menjadi skala prioritas	Usulan	200 Usulan
	Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen pengawasan pembangunan drainase perkotaan yang tersusun	Dokumen	27 Dokumen
	Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen pengawasan pembangunan jalan dan jembatan yang tersusun	Dokumen	49 Dokumen
	Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan UPTD	Jumlah dokumen pengawasan teknis pembangunan UPTD yang tersusun	Dokumen	12 Dokumen
	Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Pemerintah	Jumlah dokumen pengawasan teknis pembangunan gedung pemerintah yang tersusun	Dokumen	48 Dokumen
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA)	Jumlah Rekomendasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) dikeluarkan	Rekomendasi	30 Rekomendasi
	Pembinaan dan Peningkatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan jasa konstruksi	orang	150 orang
		Jumlah Rekomendasi dokumen Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan dan terverifikasi	Rekomendasi	800 Rekomendasi
	sayembara Desain Infrastruktur kota	Jumlah desain Infrastruktur Kota yang mengikuti sayembara	Dokumen	1 Dokumen
	Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Cakupan Peralatan Alat-alat Berat dalam kondisi baik	

	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah Alat Berat yang dipelihara	Unit	42 Unit
	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Bengkel yang dipelihara	unit	463 unit
	Pengelolaan UPTD Perbengkelan Ke PU-an	Jumlah Alat Bengkel yang dikelola	Unit	12 Jenis
	Pemantauan Alat Berat Perbengkelan	Jumlah Alat Berat Perbengkelan yang dipantau	Unit	42 Unit
	Bimbingan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	orang	75 orang
	Pengelolaan dan Peralatan K3 UPTD Perbengkelan	Jumlah Peralatan K3 UPTD Perbengkelan yang dikelola	Orang	85 Orang
Meningkatnya layanan penerangan jalan	Program Pengadaan Lampu Jalan	Cakupan ketersediaan Lampu Jalan		88%
	Pengadaan Lampu Jalan	Jumlah pengadaan lampu jalan	Titik	2000 Titik
	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Penerangan pada Lorong-Lorong	Jumlah titik lampu jalan baru pada lorong-lorong yang terpasang	ttk	3500 ttk
	Updating Data Base Lampu Jalan di Kota Makassar	Jumlah Laporan Updating data base Lampu Jalan yang tersedia	Dokumen	1 Dokumen
	Penerapan Smart PJU	Jumlah titik yng terpasang Smart PJU	ttk	250 ttk
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Lampu Jalan	Presentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik		90%
	Langganan Penerangan Lampu Jalan	Jumlah KWH Penerangan Jalan Umum (BPJU) yang terbayarkan	KWH	1454 KWH
	Rehabilitasi Penerangan lampu Jalan	Jumlah Lampu Jalan Kota yang terpelihara	Titik	20.000 Titik
	Pengawasan/Pengecekan Meteran langganan Listrik	Jumlah pengecekan meteran langganan listrik	KWH	17448 KWH
	Penggantian Lampu Jalan Konvensional dengan LED	Jumlah Penggantian lampu jalan konvensional ke LED yang tersedia	ttk	1500 ttk
	Penanganan B3 Lampu Mercury	Jumlah Limbah B3 Lampu Mercury yang ditangani	Kg	1000 Kg
	Pendataan dan Pengawasan Penyedia Tenaga Listrik	Jumlah Penyedia Tenaga Listrik yang terdata		
	Sosialisasi Penerangan Jalan dan Taman	Jumlah peserta sosialisasi penerangan jalan dan taman	Orang	150 Orang
	Inspeksi Penerangan Jalan	Jumlah Dokumen Pemantauan Lampu Jalan	Dokumen	4 Dokumen
	Normalisasi Panel dan Jaringan Lampu Jalan	Jumlah unit PJU yang dinormalisasi	Unit	1300 Unit
Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman	Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah	Cakupan mutu pelayanan sistem air limbah domestik		60%
	Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah On Site Sistem (IPAL Komunal)	Jumlah Peserta sosialisasi pengelolaan air limbah on site system (IPAL Komunal)	Orang	480Orang

Sosialisasi Pembinaan Penyedotan Tangki Septik Individual & LLTT	Jumlah Kepala Keluarga (KK) tersosialisasi pembinaan penyedotan tangki septik individual & LLTT	KK	600 KK
Sosialisasi Penguatan Kelembagaan IPAL Komunal	Jumlah Badan Pengelola IPAL Komunal bermasalah dapat diberdayakan aktif dan mandiri	kelembagaan	33 kelembagaan
Penyusunan Data Base Pengelolaan Air Limbah	Jumlah laporan data base Pengelolaan Air Limbah	Laporan	12 Laporan
Pendataan Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (P-SLLT)	Jumlah laporan pendataan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)	laporan	12 laporan
Lomba Pengelolaan Air Limbah di Tingkat Masyarakat	Jumlah pemenang lomba pengelolaan air limbah ditingkat masyarakat	Pemenang	6 Pemenang
Penyusunan Regulasi Pengelolaan Air Limbah	Jumlah dokumen regulasi jasa penyedot tinja	Dokumen	2 Dokumen
Sosialisasi Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta Sosialisasi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Makassar	Orang	600 Orang
Pelatihan Pengelolaan UPTD PAL	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Pengelolaan UPTD PAL	Orang	100 Orang
Penyusunan dan revisi SOP UPTD PAI	Jumlah Dokumen SOP yang direvisi	Dokumen	1 Dokumen
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan IPLT	Terpeliharanya sarana dan prasarana IPLT dalam kondisi baik	Laporan	12 Laporan
Inspeksi Kondisi Sarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana yang dilakukan inspeksi pengelolaan air limbah	Lokasi	131 Lokasi
Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah Domestik (IPAL Komunal)	Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL Komunal) dalam kondisi baik	Lokasi	66 Lokasi
Pengujian Berkala Effluent IPAL Komunal, IPAL Kawasan dan IPLT	Jumlah titik pengujian hasil effluent secara berkala dan komprehensif	titik	60 titik
Peningkatan Fasilitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Nipa- nipa	Jumlah Fasilitas Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Nipa-nipa yang ditingkatkan	Unit	1 Unit

Makassar, 3 Januari 2019

Mengetahui,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar



Dr. M. ANSAR, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19630517 199203 1 004

B. Metodologi Pengukuran Kinerja.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2012, didasarkan pada SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yaitu input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil).

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar pada Tahun 2018 akan melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- ✓ Pembangunan infrastruktur yang mendorong sector niaga dan jasa;
- ✓ Pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan serta peningkatan manajemen transportasi perkotaan yang mudah diakses;
- ✓ Peningkatan dan pemeliharaan lingkungan perumahan, permukiman dan penataan kawasan kumuh serta kesiap-siagaan penanggulangan bencana secara terpadu;
- ✓ Pengadaan rutin sosialisasi gerakan bersih saluran drainase kepada masyarakat perkotaan;

C. Hasil Pengukuran Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dinyatakan berhasil, tidak hanya berupa bentuk keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan namun lebih jauh dari itu manfaat dan dampak jangka panjang yang dapat dirasakan dari suatu kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Tingkat Keberhasilan Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2018 akan diperoleh dengan nilai baik apabila kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Berkaitan dengan itu pula, guna peningkatan kinerja capain sasaran program kegiatan, beberapa masalah yang saat ini dihadapi dalam rangka perbaikan perencanaan pembangunan kota kedepan, diupayakan dapat teratasi dengan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, efektifitas dan peningkatan profesionalitas aparat sehingga konsistensi Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang telah dituangkan dalam rencana strategis Dinas pekerjaan Umum Kota makassar dapat berjalan sesuai sasaran yang yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk akuntabilitas melalui pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar di masa depan.